

LAPORAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2026

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG

Menjaga Pintu Masuk Negara, Melindungi Kesehatan Masyarakat





KATA PENGANTAR



Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Semester I Tahun 2026 dapat tersusun berkat kerja sama yang baik dari seluruh anggota Tim Penyusun Laporan Kinerja yang terlibat.

Laporan kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian program-program kegiatan Semester I Tahun 2026. Laporan kinerja ini merupakan evaluasi kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang pada Semester I Tahun 2026 yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kinerja selanjutnya.

Laporan kinerja Semester I Tahun 2026 ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan laporan kinerja yang lebih baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan berkerjasama dalam pencapaian indikator kinerja dan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang penyelenggaraan program di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.

Pangkalpinang, 14 Juli 2026

Hormat Saya,



Agus Syah Fiqh Haerullah, S.K.M., M.K.M.
NIP 197207061998031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. ISU STRATEGIS	2
D. VISI DAN MISI	6
E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	8
F. STRUKTUR ORGANISASI	9
G. SUMBER DAYA MANUSIA	11
H. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. PERENCANAAN KINERJA	17
B. CASECADING KINERJA	21
C. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
B. REALISASI ANGGARAN	91
C. EFISIENSI SUMBER DAYA	102
BAB IV PENUTUP	105



A. KESIMPULAN	105
B. RENCANA TINDAK LANJUT	106



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu	14
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Umum	15
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026	18
Tabel 2. 2 Target Rencana Aksi Kegiatan (RAK)	19
Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026	20
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026	24
Tabel 3. 3 Hasil Pemeriksaan 4 Parameter	27
Tabel 3. 4 Perbandingan Antar Tahun Realisasi Kinerja dengan Target RAK BKK Kelas II Pangkalpinang Tahun 2025-2029	30
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator I BKK Kelas II Pangkalpinang dengan 9 Satuan Kerja Tahun 2026 (Semester 1)	31
Tabel 3. 6 Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai Kekarantinaan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2025	38
Tabel 3. 7 Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai Kekarantinaan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2025 dan Tahun 2024	40
Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi nilai SAKIP dengan standar nasional	42
Tabel 3. 9 Hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2026	53
Tabel 3. 10 Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dengan standar nasional	61
Tabel 3. 11 Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja per 30 Juni 2026	66
Tabel 3. 12 Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana per 30 Juni 2026	66
Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja per 30 Juni 2026	67
Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana per 30 Juni 2026	67
Tabel 3. 15 Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	71
Tabel 3. 16 perbandingan data kinerja indikator pelayanan alat angkut kategori merah (alat angkut yang teridentifikasi memiliki faktor risiko penyakit tinggi atau membawa penyakit menular)	78



Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala BKK dengan Satker Lain.....	88
Tabel 3. 18 Rekapitulasi keseluruhan distribusi pagu penguatan dukungan pelaksanaan prioritas direktif presiden	92
Tabel 3. 19 Distribusi Buka Blokir Pagu Anggaran Bulan April TA 2026	93
Tabel 3. 20 Alokasi Anggaran Blokir per Jenis Belanja Tahun 2026.....	93
Tabel 3. 21 Alokasi Anggaran Blokir per Jenis Sumber Dana Tahun 2026	94
Tabel 3. 22 Alokasi Anggaran Blokir per Per Program/Kegiatan Tahun 2026	94
Tabel 3. 23 Alokasi Anggaran Blokir per Jenis RO Tahun 2025	95
Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja	97
Tabel 3. 25 Realisasi Anggaran per Sumber Dana	97
Tabel 3. 26 Realisasi Anggaran per Jenis Program/Kegiatan	98
Tabel 3. 27 Realisasi Anggaran Per Indikator.....	98
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi dan Anggaran per Rincian Output	100
Tabel 3. 29 Nilai Efisiensi per Indikator Kinerja Tahun 2026	103
Tabel 3. 30 Nilai Efisiensi SBK Semester I Tahun 2026	104



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Grafik 1. 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	12
Grafik 1. 3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	13
Grafik 1. 4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	13
Grafik 3. 1 Distribusi Target dan Realisasi Indikator I Di BKK Kelas II Pangkalpinang Periode Semester 1 Tahun 2026	28
Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator I Di BKK Kelas II Pangkalpinang Periode Tahun 2024-2026	29
Grafik 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SAKIP	38
Grafik 3. 4 Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2022 s.d Tahun 2025	41
Grafik 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP dengan Target RAK	42
Grafik 3. 6 Perbandingan realisasi kinerja Nilai SAKIP dengan satker lain	43
Grafik 3. 7 Target , Realisasi dan Proyeksi Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang	50
Grafik 3. 8 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Semester I Tahun 2025 dan 2026	51
Grafik 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK	52
Grafik 3. 10 Perbandingan realisasi kinerja indikator nilai kinerja anggaran dengan satker lain	54
Grafik 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	59
Grafik 3. 12 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti Tahun 2025 dan Tahun 2026	60
Grafik 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dengan Target RAK	60
Grafik 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dengan Satker Lain	62
Grafik 3. 15 Target , Realisasi dan Proyeksi Capaian Persentase Realisasi Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang	68



Grafik 3. 16 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	69
Grafik 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK	70
Grafik 3. 18 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran dengan Satker Lain ..	71
Grafik 3. 19 Target dan Realisasi Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2 x 24 Jam	79
Grafik 3. 20 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK	80
Grafik 3. 21 Perbandingan realisasi kinerja penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2 x 24 jam dengan satker lain	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2026	10
Gambar 2. 1 Casecading Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2026	21
Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja BKK Kelas II Pangkalpinang.....	22
Gambar 3. 1 Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas II Pangkalpinang Semester I Tahun 2026.....	48



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini sebagai salah satu cara untuk evaluasi yang objektif, efisien, dan efektif terhadap kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang. Pelaporan disusun untuk menjelaskan tentang pencapaian target indikator-indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2026.

Analisis Kinerja yang digunakan yaitu analisis kinerja dari tiap capaian indikator kinerja, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja kegiatan dan tingkat keberhasilan pencapaian indikator kinerja Semester I Tahun 2026. Hasil analisis capaian indikator kinerja Semester I Tahun 2026 menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 112,50% dengan capaian realisasi anggaran 48,27% dari target akhir Tahun 2026 sebesar 96%.

Capaian 7 Indikator Kinerja Semester I Tahun 2026 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dijanjikan oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang kepada Direktur Jenderal P2 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah tercapai sebesar 100% dari target 76% dengan persentase capaian kinerja sebesar 131,58%.
2. Nilai SAKIP tercapai sebesar 83,70 dari target 83 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,84%.
3. Nilai kinerja anggaran tercapai sebesar 66,82 dari target 46,40 dengan persentase capaian kinerja sebesar 144,01%.
4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti tercapai sebesar 100% dari target 95 dengan persentase capaian kinerja 105,26%.
5. Persentase realisasi anggaran tercapai sebesar 48,27% dari target 48% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,56%.
6. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori merah kurang dari 2 x 24 Jam tercapai sebesar 100% dari target 95% dengan persentase capaian kinerja sebesar 105,26%.



7. Penyalanggunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance tercapai sebesar 0
Penyalahgunaan dari target 0 penyalahgunaan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2026 memiliki total pagu anggaran sebesar Rp. 14.616.349.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 13.455.406.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 1.160.943.000,-. Realisasi anggaran per Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 6.815.082.213 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 48,27%. Alokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 10.641.604.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.489.123.185,- dan persentase capaian 51,58%. Alokasi anggaran belanja barang sebesar Rp. 3.477.252.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.325.959.028 dan pesentase capaian pagu efektif sebesar 48,27%.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan adalah UPT yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit, dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat makanan kosmetik alat kesehatan dan bahan berbahaya (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia, dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara yang menjadi wilayah kerjanya.

Sebagai instansi pemerintahan di bawah Kementerian Kesehatan RI maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Semester I Tahun 2026 yang bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian secara menyeluruh tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Permenkes RI Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Semester I Tahun 2026 menjelaskan pencapaian target indikator-indikator sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan



Kementerian Kesehatan, isi laporan meliputi uraian pelaksanaan kegiatan /program/kebijaksanaan selama Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang tahun 2025 - 2029. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud melaksanakan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang adalah

1. Memberikan informasi kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang selama Semester I Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dalam mencapai sasaran/indikator kinerja kegiatan instansi.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang untuk meningkatkan kinerja.
4. Sebagai salah satu upaya mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintah.

C. ISU STRATEGIS

Permasalahan kesehatan yang dihadapi Indonesia semakin kompleks, ditandai oleh beban ganda penyakit menular dan penyakit tidak menular, tantangan *triple burden of malnutrition*, serta meningkatnya risiko ancaman penyakit lintas



negara seiring tingginya mobilitas manusia dan barang. Kondisi ini mendorong Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan agenda RPJMN untuk mempercepat Transformasi Kesehatan, khususnya penguatan layanan primer dan ketahanan kesehatan, yang menempatkan pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat sebagai pilar utama.

Secara nasional dan global, Indonesia masih menghadapi beban penyakit menular yang tinggi, antara lain Tuberkulosis (TB) sebagai beban kedua terbesar di dunia (incidence rate 387 per 100.000 penduduk), HIV yang belum mencapai target 95-95-95 pada tahun 2030, serta penyakit tular vektor seperti dengue dan malaria yang masih sulit dieliminasi. Di saat yang sama, transisi epidemiologi menyebabkan peningkatan signifikan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung yang mendominasi beban DALYs nasional dan membebani pembiayaan kesehatan. Tantangan ini diperberat oleh masih rendahnya cakupan skrining kesehatan, keterbatasan integrasi deteksi dini dan manajemen penyakit kronis di layanan primer, serta lemahnya sistem surveilans di beberapa wilayah.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tantangan penyakit tidak menular menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat jumlah penderita diabetes melitus sebanyak 28.559 orang pada tahun 2024 dan diperkirakan meningkat signifikan pada tahun 2025. Prevalensi hipertensi mencapai 30,9% pada tahun 2023 dan menempati urutan teratas penyakit terbanyak di provinsi ini. Tingginya beban PTM ini berkaitan erat dengan perilaku hidup tidak sehat, seperti pola makan tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik, sehingga membutuhkan penguatan layanan promotif dan preventif di layanan primer.

Selain penyakit menular dan tidak menular, Indonesia juga menghadapi *triple burden of malnutrition*, yang ditandai oleh masih tingginya prevalensi stunting, wasting, dan anemia pada balita, ibu hamil, dan remaja, di tengah peningkatan obesitas pada anak dan dewasa. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meskipun sempat terjadi penurunan prevalensi stunting, pada tahun 2023 kembali tercatat peningkatan menjadi sekitar 20,6%. Pendataan keluarga berisiko stunting mencatat 33.031 keluarga berisiko tinggi, termasuk ibu hamil dan anak usia 0–24 bulan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas jangka panjang.



Menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan intervensi strategis melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya promotif-preventif dan deteksi dini yang terintegrasi. Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui pemenuhan gizi, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Program MBG ditujukan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menuju pola makan gizi seimbang.

Namun demikian, implementasi Program MBG juga menghadapi tantangan keamanan pangan. Berdasarkan Surat Direktur Surveilans Karantina Kesehatan Nomor SR.02.04/CV/11085/2025 tanggal 8 Oktober 2025 tentang kewaspadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan MBG, diperlukan dukungan aktif Unit Pelaksana Teknis bidang Kekarantinaan Kesehatan. Balai Kekarantinaan Kesehatan Pangkalpinang berperan dalam mendukung upaya penanggulangan KLB keracunan pangan MBG melalui koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Puskesmas, khususnya dalam pemantauan program MBG dan pengawasan hygiene sanitasi sarana produksi dan peredaran pangan (SPPG).

Dalam mendukung penguatan layanan primer, Balai Kekarantinaan Kesehatan Pangkalpinang turut berkontribusi dalam deteksi dini penyakit menular seperti HIV/AIDS dan Tuberkulosis pada anak buah kapal dan komunitas pelabuhan/bandara, termasuk tenaga kerja bongkar muat, sopir, dan pegawai. Kegiatan skrining dilakukan melalui *VCT Mobile* di Pelabuhan Pangkalbalam, Tanjungpandan, Belinyu, Tanjungkalian Mentok, Saddai, dan Sungai Selan, dengan total 308 orang disaring dan seluruhnya menunjukkan hasil non-reaktif.

Pada September 2025, Balai Kekarantinaan Kesehatan Pangkalpinang menangani satu kasus Tuberkulosis (TB) sensitif obat pada Anak Buah Kapal (ABK) KLM *Mitra Buana* yang bersandar di Pelabuhan Pelayaran Rakyat Ketapang. Kasus terkonfirmasi melalui pemeriksaan dahak dengan hasil MTB TB sensitif obat. BKK Pangkalpinang segera melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) di kapal terhadap delapan ABK, termasuk pelacakan kontak erat, pengambilan sampel dahak pada seluruh ABK, pemberian edukasi TB, serta koordinasi pengobatan lanjutan dengan Puskesmas Pangkalbalam. Tindakan pengendalian risiko turut dilakukan melalui penerapan protokol pencegahan penularan selama pelayaran, disinfeksi ruang kapal, serta koordinasi lintas sektor dengan agen kapal dan otoritas pelabuhan.



Penanganan kasus ini mencerminkan peran aktif BKK dalam deteksi dini, pengendalian penyakit menular, dan pencegahan risiko penularan lintas wilayah di pintu masuk negara.

Selain itu, BKK Pangkalpinang juga melaksanakan deteksi faktor risiko penyakit tidak menular melalui Cek Kesehatan Gratis (CGK) dengan metode pemeriksaan paket cepat di pintu masuk wilayah, meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, lingkar perut, serta pemberian edukasi kesehatan kepada pelaku perjalanan dan komunitas pelabuhan/bandara. Sejak bulan Maret – Desember 2025, BKK Pangkalpinang telah melakukan layanan CGK terhadap 508 orang dengan sasaran masyarakat umum, komunitas pelabuhan dan bandara, anak buah kapal (ABK) serta pelaku perjalanan. Program CKG memberikan manfaat dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dasar, namun masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan, antara lain keterbatasan sosialisasi sehingga pemanfaatan layanan masih rendah, keterbatasan tenaga kesehatan, kendala teknis aplikasi, serta belum optimalnya tindak lanjut pasca pemeriksaan.

Dalam konteks transformasi ketahanan kesehatan, pintu masuk negara merupakan titik kritis pencegahan penyakit, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman pandemi COVID-19. Ancaman Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) seperti COVID-19, Mpox, dan penyakit emerging-reemerging lainnya menuntut penguatan surveilans, kapasitas diagnostik, kesiapsiagaan tanggap darurat, serta kepatuhan terhadap International Health Regulations (IHR) 2005. Monkeypox (mpox) sebagai penyakit zoonosis emerging telah ditetapkan WHO sebagai PHEIC pada 23 Juli 2022. Hingga 10 Januari 2025, dilaporkan 84.415 kasus di 110 negara dengan 76 kematian. Indonesia melaporkan kasus pertama pada 20 Agustus 2022 dan hingga tahun 2025 tercatat 72 kasus konfirmasi di enam provinsi tanpa kematian. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam deteksi dini dan pencegahan penyakit lintas negara di pintu masuk wilayah.

Jumlah pelaku perjalanan tahun 2025 khususnya di pintu masuk pelabuhan/bandara Bangka Belitung sebanyak 3.197.293 orang, sehingga kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko terjadinya transmisi penyakit menular antar negara. Terkait dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara, maka kewenangan Balai Kekarantinaan



Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dalam menentukan istita'ah kesehatan pada pemeriksaan di asrama haji antara dan kelaikan terbang seorang jama'ah haji. Selain itu, terkait dengan proses dokumen keberangkatan jama'ah umroh juga mengalami perubahan regulasi dibandingkan pada tahun 2023. Melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Dan Umrah menyatakan bahwa setiap jama'ah umroh diwajibkan untuk mendapatkan Vaksinasi Meningitis Meningokokus.

Berbagai langkah strategis dilaksanakan oleh pemerintah dari regulasi yang diterapkan pada pintu masuk, peningkatan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama yang berasal dari negara terjangkit penyakit infeksi emerging (Monkey pox, Nipah dll), kegiatan surveilans sentinel ILI, Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 juga melibatkan SDMK di BKK Pangkalpinang untuk mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 secara nasional.

D. VISI DAN MISI

Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 telah menetapkan Visi Presiden 2025-2029 yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden, yaitu “Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Visi Dirjen Penanggulangan Penyakit ditetapkan selaras dengan visi Kementerian Kesehatan yaitu Populasi bebas penyakit mendukung Masyarakat yang Sehat dan Produktif guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Upaya untuk mewujudkan visi “Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045” Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), yaitu:



1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau;
3. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. Memperkuat tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju;
6. Mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien.

Seiring dengan misi Kemenkes, maka misi dari Ditjen Penanggulangan Penyakit, yakni:

1. Menjamin ketersediaan layanan penanggulangan penyakit yang bermutu, merata, dan berkeadilan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam penerapan gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko penyakit.
3. Memperkuat program imunisasi nasional sebagai perlindungan utama terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
4. Mengendalikan risiko lingkungan terhadap kesehatan melalui pengawasan dan peningkatan kualitas sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah, dan pengawasan lingkungan berbasis risiko
5. Meningkatkan ketahanan sistem kesehatan dengan mengembangkan sistem surveilans, dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa/ wabah secara terintegrasi, berbasis data, dan teknologi di wilayah dan pintu masuk negara
6. Meningkatkan akuntabilitas program penanggulangan penyakit melalui Perencanaan berbasis data, Transparansi anggaran dan pelaporan program, Monitoring dan evaluasi berkala dan objektif, Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola program

Adapun misi dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, yakni :

1. Meningkatkan sistem surveilans, kemampuan deteksi penyakit, pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit berpotensi KKMMMD
2. Meningkatkan tata kelola pelayanan dan dukungan manajemen kekarantinaan kesehatan yang bersih dan akuntabel yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi



3. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di pintu masuk negara, wilayah buffer dan perimeter
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia
5. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi efektif dengan jejaring.

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 10 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, disebutkan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkantor di daerah atau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Klasifikasi

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. BKK secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Balai Kekarantinaan Kesehatan Pangkalpinang termasuk klasifikasi BKK Kelas II.

2. Tugas

BKK mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BKK Kelas II Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;



- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi BKK.

F. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Struktur organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang terdiri dari :

- 1. Kepala Balai;
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Struktur organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2026





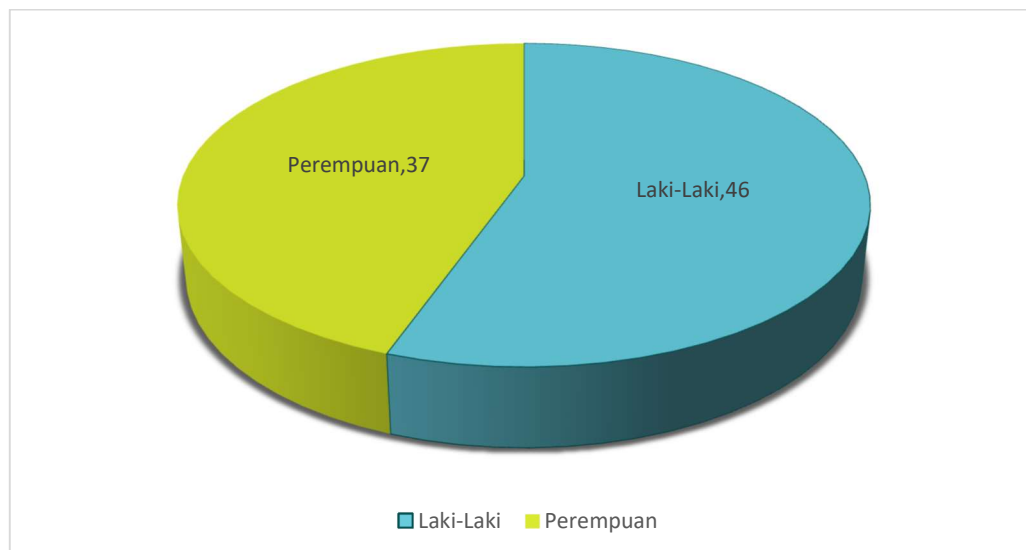
G. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan kinerja yang baik bagi organisasi. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA), Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2026 memiliki 83 ASN yang terdiri dari 62 orang PNS dan 21 orang PPPK. Selain itu Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II 23 orang tenaga outsourcing yang dibiayai dari DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang sebagai tenaga pengemudi, satpam/tenaga keamanan, petugas kebersihan dan pramubakti.

1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang memiliki jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dari jumlah pegawai perempuan. Adapun jumlah pegawai laki-laki sebanyak 46 orang (55%) dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 37 orang (45%). Distribusi pegawai berdasarkan jenis kelamin sesuai grafik berikut ini:

Grafik 1. 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

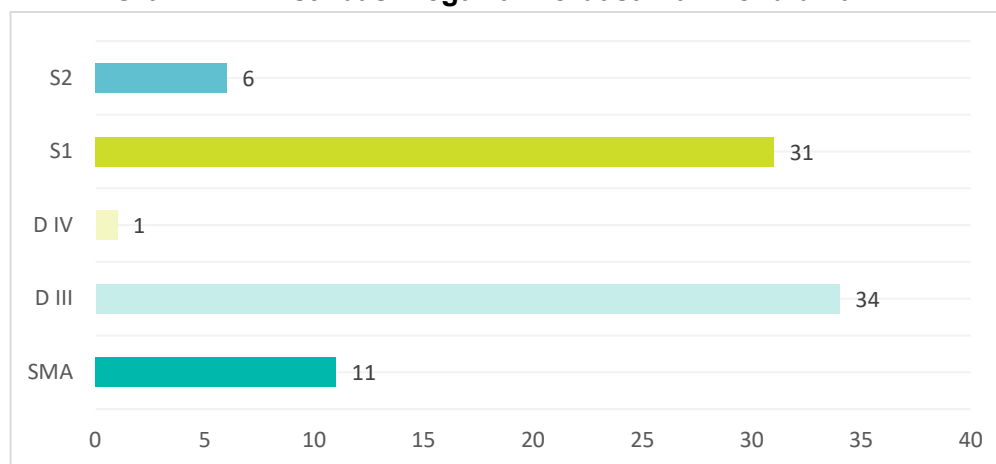




2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang memiliki jenjang pendidikan tertinggi Pasca Sarjana (S2) dan terendah SMA/ sederajat.

Grafik 1. 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan grafik di atas, pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dengan pendidikan S2 sebanyak 6 orang (7,2%), S1 sebanyak 31 orang (37,3%), D IV sebanyak 1 orang (1,2%), D III sebanyak 34 orang (41%), dan SMA/ sederajat sebanyak 11 orang (13,3%).

3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang memiliki pangkat/golongan paling tinggi yaitu Pembina (IV/a) dan paling rendah Pengatur (II/c).



Grafik 1. 3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

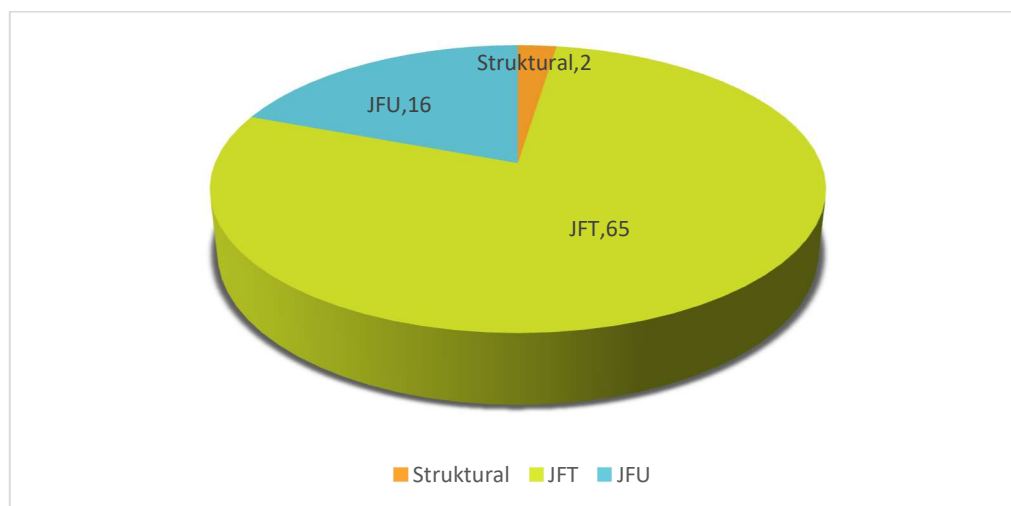


Berdasarkan grafik di atas menunjukkan tingkat kepangkatan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang, dengan pangkat /golongan Pembina (IV/a) sebanyak 3 orang, Penata Tk.I (III/d) sebanyak 11 orang, Penata (III/c) sebanyak 12 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) sebanyak 10 orang, Penata Muda (III/a) sebanyak 11 orang, Pengatur Tk.I (II/d) sebanyak 4 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 11 orang, Golongan X sebanyak 2 orang, Golongan IX sebanyak 2 orang, Golongan VII sebanyak 9 orang dan Golongan V sebanyak 8 orang.

4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Distribusi pegawai berdasarkan kelompok jabatan, dibagi menjadi 3 yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.

Grafik 1. 4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan





Berdasarkan grafik di atas, jabatan struktural terdiri dari 2 orang (2,4%), jabatan fungsional tertentu sebanyak 65 orang (78,3%) dan jabatan fungsional umum sebanyak 16 orang (19,3%).

a. Jabatan Struktural

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. Jabatan struktural di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang berjumlah 2 orang yaitu kepala balai dan kepala sub bagian administrasi umum.

b. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional tertentu di BKK Kelas II Pangkalpinang berjumlah 59 orang.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

No	Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai
1	Dokter Ahli Muda	4
2	Dokter Ahli Pertama	2
3	Adminkes Ahli Pertama	1
4	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	8
5	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	3
6	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	1
7	Epidemiolog Kesehatan Terampil	5
8	Sanitarian Ahli Muda	2
9	Sanitarian Ahli Pertama	3
10	Sanitarian Mahir	2
11	Sanitarian Terampil	3
12	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	2
13	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	1
14	Entomolog Kesehatan Terampil	3
15	Perawat Penyelia	2
16	Perawat Mahir	7

17	Perawat Terampil	5
18	Pranata Lab. Kesehatan Ahli Pertama	1
19	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Pertama	1
20	Perencana Ahli Pertama	1
21	Pranata Humas Ahli Pertama	1
22	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
23	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
24	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (JFT)	1
25	Pranata SDMA Terampil	1
26	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
27	Pranata Komputer Terampil	1
28	Arsiparis Terampil	1
Total		65

Sumber Data : DUK per 30 Juni 2026

c. Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional umum di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang berjumlah 16 orang.

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai
1	Penata Kelola Layanan Kesehatan	2
2	Operator Layanan Kesehatan	1
3	Penata Layanan Operasional	3
4	Operator Layanan Operasional	10
Total		17

Sumber Data : DUK per 30 Juni 2026

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Semester I Tahun 2026 menjelaskan tentang pencapaian kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang selama Januari - Juni Tahun 2026. Capaian



kinerja tersebut dibandingkan juga dengan tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi, analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang telah ditetapkan serta memungkinkan identifikasi sejumlah perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu, sistematika penulisan laporan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- Ikhtisar Eksekutif
- Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang serta sistematika penulisan.
- Bab II (Perencanaan Kinerja), menjelaskan tentang perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja Tahun 2026.
- Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan pengukuran kinerja, capaian kinerja Semester I Tahun 2026, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja.
- Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan dan tindak lanjut atas laporan kinerja Semester I Tahun 2026



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam penyusunan perencanaan kinerja terdiri atas tiga instrumen yaitu Rencana Aksi Kegiatan (RAK), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2025 – 2029

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) Kemenkes RI. Olehnya itu, Kegiatan yang dilaksanakan di BKK harus mendukung program yang direncanakan pada Ditjen P2. Rencana program yang disusun di Ditjen P2 juga harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2025 - 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 masih sama dengan indikator di Tahun 2024.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Penanggulanagn Penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan melalui Kementerian Kesehatan melalui program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Sesuai dengan visi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang untuk menjadi **“Balai Kekarantinaan Kesehatan Tangguh dan Terdepan dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat di Pintu Masuk negara Menuju Indonesia Sehat dan Tangguh 2045”**, berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.



Balai Karantina Kesehatan Kelas II Pangkalpinang telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi yakni:

- a) Melaksanakan upaya pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, faktor risiko kesehatan, serta dampak kesehatan masyarakat di pintu masuk negara
- b) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pelayanan kekarantinaan kesehatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas
- c) Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital dan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan transparansi layanan publik
- d) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan prima melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Dalam upaya mencapai misi tersebut perlu ditetapkan sasaran kegiatan agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat jelas dan terukur serta berorientasi hasil atau menghasilkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun sasaran kegiatan tahun 2026 – 2029 yaitu :

- a) Meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah.
- b) Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Indikator Kinerja Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026
Meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.	Nilai SAKIP
	Nilai Kinerja Anggaran
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti
	Persentase Realisasi Anggaran



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026
	Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Alat Angkut Dalam Kategori Merah kurang dari 2x24 Jam
	Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance

Berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai, telah ditetapkan target rencana aksi kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2026 - 2029 sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Target Rencana Aksi Kegiatan (RAK)
Tahun 2026 – 2029**

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
		2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah					
1	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76	77	78	79
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
2	Nilai SAKIP	83	83	83	83
3	Nilai Kinerja Anggaran	92,75	92,95	93,15	93,35
4	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	95%	95%	95%
5	Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%
6	Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori merah kurang dari 2 x 24 Jam	95%	95%	95%	95%
7	Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, Target kinerja Tahun 2026 - 2029 cenderung meningkat pada indikator Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah, nilai SAKIP dan nilai kinerja anggaran. Sedangkan indikator lainnya target ditetapkan di angka yang sama. Target kinerja tahun 2026 - 2029 dinilai sangat realistis untuk dicapai, dan



semua indikator secara substantif telah mencapai kondisi optimal sejak awal periode perencanaan.

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

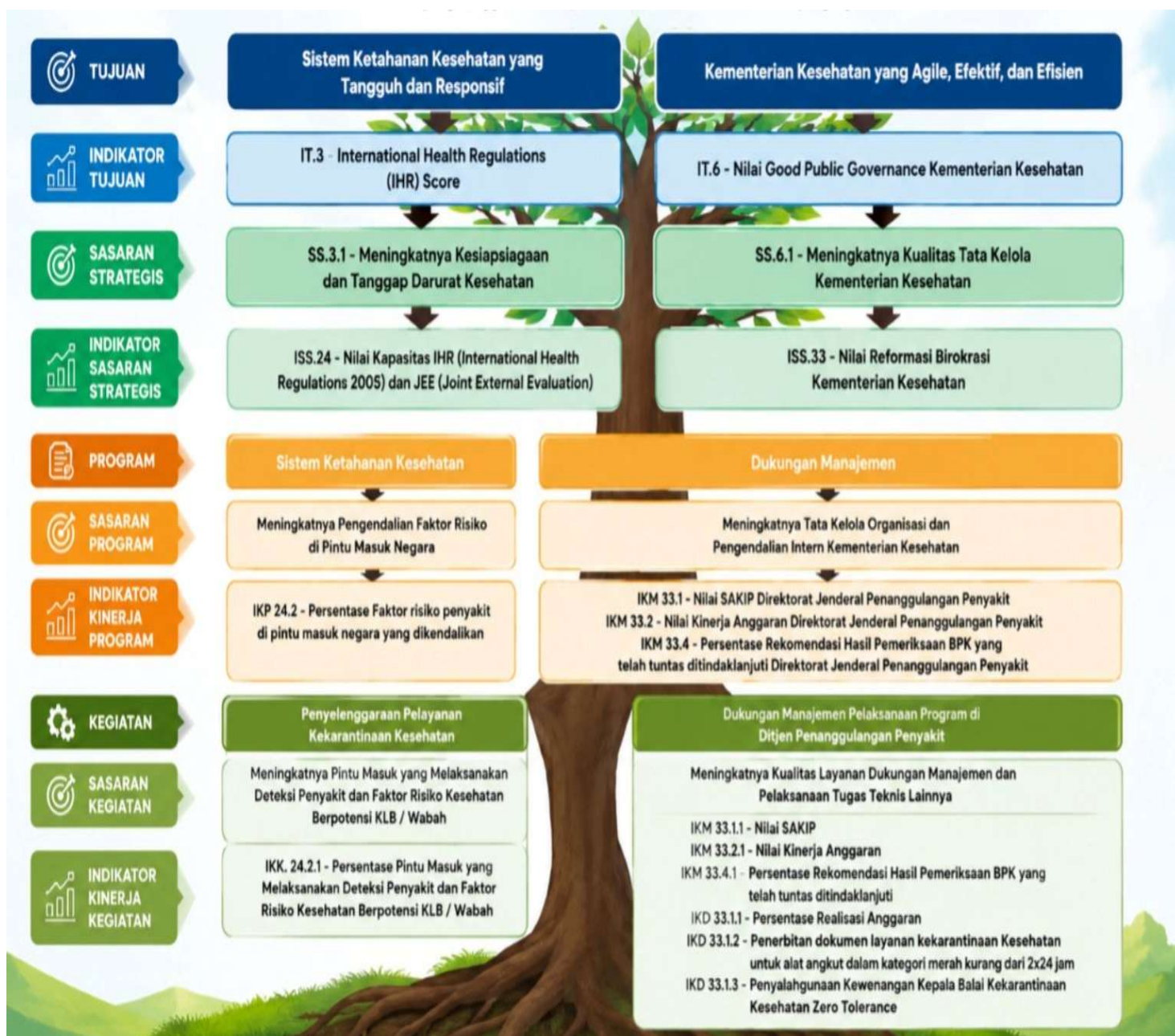
Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76%	1.017.406.000
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	Nilai SAKIP	83	96.386.000
		Nilai Kinerja Anggaran	92,75	17.560.000
		Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	0
		Persentase Realisasi Anggaran	96%	12.957.913.000
		Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori merah kurang dari 2 x 24 Jam	95%	17.793.000
		Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0	11.798.000

B. CASECADING KINERJA

Casacading kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Casecading Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2026



C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Adapun target kinerja dan sasaran strategis yang ingin dicapai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja BKK Kelas II Pangkalpinang Tahun 2026

NO.	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif	IT 3 - <i>International Health Regulations (IHR) score</i>	
	SS 3.1 Meningkatnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan	ISS 24 - Nilai Kapasitas IHR dalam JEE	
	024.DZ Program Sistem Ketahanan Kesehatan		
	Sasaran Program: Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	IKP 24.2 - Persentase Faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan	
	7960 Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	IKK 24.2.1 - Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76 %
2.	Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6 - Nilai <i>Good Public Governance</i> Kementerian Kesehatan	
	SS 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33 - Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	
	024.WA Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKM 33.1 - Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	
		IKM 33.2 - Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	
		IKM 33.4 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	
	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	IKM 33.1.1 - Nilai SAKIP	83 Nilai
		IKM 33.2.1 - Nilai Kinerja Anggaran	92,75 Nilai
		IKM 33.4.1 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95 %
		IKD 33.1.1 - Persentase Realisasi Anggaran	96 %
		IKD 33.1.2 - Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	95 %
		IKD 33.1.3 - Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0 Penyalahgunaan

NO.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	Rp. 1.017.406.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	Rp. 13.101.450.000
Total Anggaran DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkal Pinang		Rp. 14.118.856.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/ kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun berjalan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kinerja dan hasil (outcome) dari setiap program. Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Capaian kinerja ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atas hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja BKK Kelas II



Pangkalpinang Tahun 2026 masing-masing indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2026	Target Kinerja Semester I Tahun 2026	Capaian Semester I Tahun 2026	% Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026
1	Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76%	76%	100%	131,58
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	Nilai SAKIP	83	83	83,70	100,84
		Nilai Kinerja Anggaran	92,75	46,40	66,82	144,01
		Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	95%	100%	105,26
		Persentase Realisasi Anggaran	96%	48%	48,27%	100,56
		Penerbitan Dokumen Layanan KekarantinaanKesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori merah kurang dari 2 x 24 Jam	95%	95%	100,0%	105,26
		Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0	0	0,00%	100,00
Total Capaian						787,52
Rata - Rata Capaian						112,50

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang per Semester I Tahun 2026 terlihat dari rata-rata capaian indikator sebesar 112,50%. Pencapaian kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang secara lebih lanjut diuraikan masing-masing indikator yang dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.



Indikator Pertama : Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan;
- 6) Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksana Kewaspadaan Wabah;
- 7) International Health Regulations (2005).

2. Pengertian

Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah adalah indikator kinerja utama Kementerian Kesehatan untuk mengukur cakupan pelabuhan, bandara, atau pos lintas batas yang secara aktif menjalankan pengawasan kesehatan. Indikator ini memastikan pintu masuk negara memiliki kapasitas untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman penyakit menular yang berpotensi menyebar luas dan menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB)

3. Definisi Operasional

Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/ PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian faktor risiko pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan. dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah.



4. Rumus / Cara Perhitungan

Cara perhitungannya adalah dengan membagi jumlah pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/ PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian faktor risiko pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan. dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah dengan dengan seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik kemudian dikali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah}}{\text{seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik}} \times 100\%$$

Adapun jumlah total pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang ada di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang sebanyak 7 pelabuhan/ bandara, yaitu:

- 1) Pelabuhan Pangkalbalam, yang berada pada wilayah administratif Kota Pangkalpinang (Pulau Bangka);
- 2) Pelabuhan Muntok, yang berada pada wilayah administratif Kabupaten Bangka Barat (Pulau Bangka);
- 3) Pelabuhan Belinyu, yang berada pada wilayah administratif Kabupaten Bangka (Pulau Bangka);
- 4) Pelabuhan Sungaiselan, yang berada pada wilayah administratif Kabupaten Bangka Tengah (Pulau Bangka);
- 5) Bandara Depati Amir, yang berada pada wilayah administratif Kabupaten Bangka Tengah (Pulau Bangka);
- 6) Pelabuhan Tanjung Pandan, yang berada pada wilayah administratif Kabupaten Belitung (Pulau Belitung);
- 7) Pelabuhan Manggar, yang berada pada wilayah administratif Kabupaten Belitung Timur (Pulau Belitung)



5. Capaian Indikator

a. Realisasi Capaian

Suatu pintu masuk pelabuhan/ bandara domestik yang dikategorikan mencapai capaian 100% jika seluruh parameter (alat angkut, orang, barang, dan lingkungan) dilakukan pemeriksaan dan atau respon sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Adapun hasil pengawasan dan respon dipintu masuk Pelabuhan/Bandara berdasarkan data capaian 4 parameter (alat angkut, orang, barang dan lingkungan) yang sesuai standar kekarantinaan kesehatan pada Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Hasil Pemeriksaan 4 Parameter

No	Pintu masuk	Parameter (Pelaksanaan Pengawasan/ Pemeriksaan)				Jumlah Parameter yang diperiksa/Respon	Capaian (%)
		Alat Angkut	Orang	Barang	Lingkungan		
1	Pelabuhan Pangkalbalam	V	V	V	V	4	100
2	Pelabuhan Muntok	V	V	V	V	4	100
3	Pelabuhan Belinyu	V	V	V	V	4	100
4	Pelabuhan Sungaiselan	V	V	V	V	4	100
5	Bandara Depati Amir	V	V	V	V	4	100
6	Pelabuhan Tanjung Pandan	V	V	V	V	4	100
7	Pelabuhan Manggar	V	V	V	V	4	100

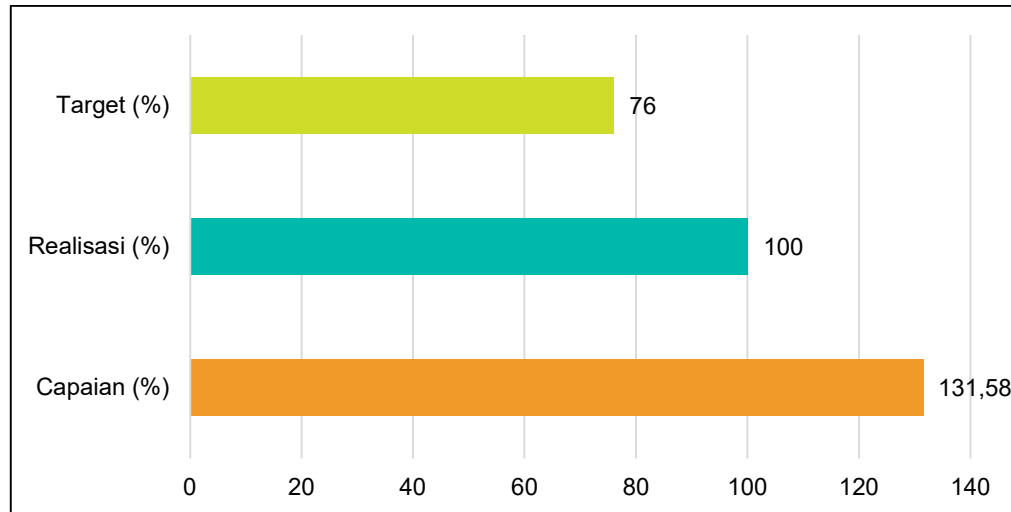
Dari Tabel 3.x diatas diketahui bahwa **seluruh (100%)** pintu masuk pelabuhan/ bandara di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang sudah melaksanakan pemeriksaan dan atau respon sesuai standar kekarantinaan kesehatan pada seluruh parameter (alat angkut, orang, barang, dan lingkungan).

b. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Target indikator persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang semester I tahun 2026 sebesar 76%. Perbandingan target dan realisasi Indikator indikator persentase pintu masuk



yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah semester I tahun 2026 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3. 1 Distribusi Target dan Realisasi Indikator I Di BKK Kelas II Pangkalpinang Periode Semester 1 Tahun 2026

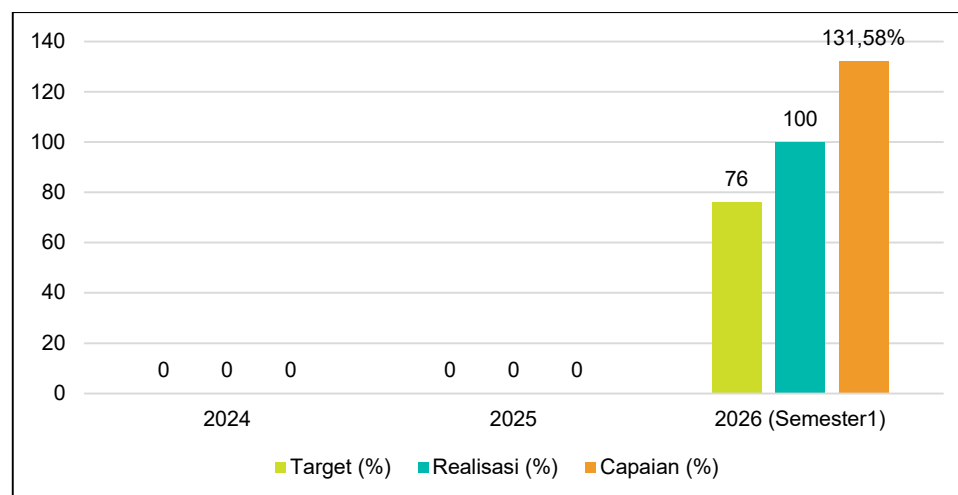
Grafik 3.x diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah pada Semester I Tahun 2026 sudah 100% dengan capaian 131,58% jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh pintu masuk pelabuhan/ bandara telah melaksanakan pemeriksaan dan pengendalian terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dini dan respons terhadap penyakit serta faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB/wabah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya kewaspadaan di pintu masuk negara. Melalui pelaksanaan deteksi secara menyeluruh pada seluruh objek pengawasan dan tindakan pengendalian terhadap seluruh faktor risiko yang ditemukan, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang mendukung dalam upaya pencegahan masuk, keluar, dan penyebaran penyakit serta memperkuat



kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi KLB, wabah, dan kedaruratan kesehatan masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah pada Semester I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, karena indikator tersebut merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2026 sebagai tindak lanjut penyesuaian Rencana Strategis (Renstra), Rencana Aksi Program (RAP), dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).



Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator I Di BKK Kelas II Pangkalpinang Periode Tahun 2024-2026

Grafik 3.2 diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada Semester I Tahun 2026 sebesar 100% melebihi dari target yang ditetapkan, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2025 ataupun tahun 2024 karena adanya perbedaan nomenklatur indikator kinerja kegiatan. Meskipun demikian, indikator tersebut tetap memiliki substansi yang relevan dalam mengukur kinerja penyelenggaraan layanan kekarantinaan kesehatan dan akan



digunakan sebagai indikator kinerja pada periode berikutnya, sehingga perbandingan capaian kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif pada tahun-tahun selanjutnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Perbandingan realisasi kinerja semester I Tahun 2026 dengan Target RAK yang dicanangkan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Perbandingan Antar Tahun Realisasi Kinerja dengan Target RAK BKK Kelas II Pangkalpinang Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target RAK									
	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	-	-	76%	100%	79%	>79%	82%	>82%	85%	>85%

Realisasi indikator pada Semester I Tahun 2026 mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan sebesar 76%. Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan di seluruh pintu masuk wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini menjadi landasan yang positif dalam menjaga keberlanjutan kinerja organisasi serta memperkuat keyakinan bahwa target indikator pada tahun-tahun berikutnya hingga akhir periode RAK Tahun 2025-2029 dicapai secara konsisten dan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung dengan adanya



peningkatan kemampuan petugas dalam pemeriksaan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan, ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan serta adanya peningkatan kapasitas pegawai yang telah diberikan pelatihan/pelatihan teknis yang menunjang kegiatan.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Satker Lainnya

Penetapan kinerja Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah dengan target 76% tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja mulai level Eselon 1 hingga akhirnya pada level Kementerian/Lembaga. Indikator ini merupakan cascading dari indikator RPJMN / Renstra Kemenkes yaitu IKP 24.2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan dengan target 96%, yang selanjutnya cascading dari indikator Ditjen Penanggulangan Penyakit yaitu IKK 24.2.2. Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah dengan target 54%. Perbandingan target dan realisasi kinerja indikator Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang semester I tahun 2026 dengan target dan realisasi satuan kerja lainnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator I BKK Kelas II Pangkalpinang dengan 9 Satuan Kerja Tahun 2026 (Semester 1)

No	Nama Satker	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
BKK KELAS II PANGKALPINANG		76	100	132
1	BKK Kelas II Bengkulu	76	100	132
2	BKK Kelas II Jambi	76	100	132
3	BKK Kelas II Sabang	76	100	132
4	BKK Kelas I Palembang	76	100	132



5	BKK Kelas I Padang	76	100	132
6	BKK Kelas I banten	76	100	132
7	BBKK Batam	76	100	132
8	BBKK Medan	76	100	132
9	BBKK Surabaya	76	100	132

Berdasarkan tabel 3.x di atas dapat diketahui bahwa dengan realisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang yang mencapai 100% dan capaian kinerja 132% jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan maka capaian ini setara dengan capaian dari 9 satuan kerja lainnya, baik itu satuan kerja Balai Besar, Kelas I, maupun Kelas II. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dalam hal melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah dipintu masuk yang menjadi kewenangan dalam tugas dan fungsi tidak kalah dengan satuan kerja lainnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh pintu masuk di wilayah kerja masing-masing melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah telah melaksanakan kegiatan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

6. Upaya yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- a. Melaksanakan deteksi dini secara aktif dan segera merespon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan di seluruh pintu masuk wilayah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengoptimalkan kegiatan surveilans berbasis risiko dengan melakukan pemetaan potensi ancaman penyakit dan peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB/Wabah.
- c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas melalui pelatihan, bimbingan teknis, simulasi penanggulangan KLB/wabah, serta sosialisasi regulasi terkait kekarantinaan kesehatan



- d. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten dalam pelaksanaan skrining, pemeriksaan kesehatan, investigasi epidemiologi, dan tindak lanjut terhadap temuan faktor risiko.
- e. Penguatan koordinasi dan jejaring kerja yang dilakukan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dengan Lintas Sektor/Lintas Program dan stakeholder di wilayah Pelabuhan dan bandara serta di wilayah (KSOP, PT. Angkasa Pura, Agen pelayaran, Maskapai penerbangan dan ABK/crew, Dinas Kesehatan Propinsi/Kota/Kabupaten) terkait kewaspadaan dini terhadap penularan penyakit dan faktor risiko kesehatan yang dibawa alat angkut
- f. Komitmen bersama SDM pelaksana program di induk dan seluruh wilayah kerja dalam kinerja dan realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi kelompok substansinya.

7. Analisa Penyebab Keberhasilan

- 1) Koordinasi dan jejaring kerja yang dilakukan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dengan Lintas Sektor/Lintas Program dan stakeholder di wilayah Pelabuhan dan bandara serta di wilayah (KSOP, PT. Angkasa Pura, Agen pelayaran, Maskapai penerbangan dan ABK/crew, Dinas Kesehatan Propinsi/Kota/Kabupaten) terkait kewaspadaan dini terhadap penularan penyakit dan faktor risiko kesehatan yang dibawa alat angkut.
- 2) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang melibatkan stakeholder seperti Pelabuhan dan Bandara Sehat, kursus singkat *hygiene sanitasi* penjamah makanan, sosialisasi vaksinasi internasional, klasifikasi *Risk Base Assestment*.
- 3) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.
- 4) Komitmen dan kerja sama seluruh SDM Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dalam melakukan kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 5) Pemanfaatan anggaran dengan mengedepankan prinsip akuntabel dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal

8. Kendala yang Dihadapi



- a. Waktu pemeriksaan faktor risiko di pintu masuk negara memakan waktu lebih lama karena keterbatasan SDM terutama di wilayah kerja;
- b. Masih terbatasnya alat dan bahan dalam melaksanakan pemeriksaan Faktor risiko di pintu masuk wilayah/Negara. Misalnya, kurangnya alat dan bahan pemeriksaan kualitas baku mutu air bersih, alat pengukuran radiasi.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat di beberapa wilayah kerja dalam menjaga kebersihan dan menjalankan program Pengendalian jentik nyamuk dengan penerapan 3 M (Menguras, Menutup dan Mengubur) dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

9. Pemecahan Masalah yang Bisa Dilakukan

- a. Pemerataan SDM di setiap wilker yang ada secara maksimal dalam pelaksanaan pemeriksaan alat angkut, orang, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan;
- b. Mengusulkan pembelian alat dan bahan yang belum tersedia untuk mengoptimalkan pemeriksaan faktor risiko di pintu masuk wilayah/Negara.
- c. Melaksanakan sosialisasi secara langsung dan melalui media sosial tentang risiko penularan penyakit melalui vector dan binatang pembawa penyakit (Nyamuk, lalat, kecoa dan tikus).

10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Efisiensi berada pada range -20 sd 20. Minus 20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya efisien.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E = Efisiensi

PAKi = Alokasi per Indikator



CKi = Persen Capaian Indikator

RAKi = Realisasi Anggaran per Indikator

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{((1.017.406.000 \times 1,32) - 414.847.998)}{414.847.997 \times 1,32} \times 100 \% = 0,69$$

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Untuk indikator kinerja Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah dapat tercapai sebesar 100% atau 131,58% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 414.847.997,- atau 40,78% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.017.406.000-. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, efisiensi berada pada 0,69 yang berarti indikator nilai kinerja anggaran berjalan efisien dengan anggaran 40,78% dapat mencapai kinerja 131,58%.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, dipengaruhi oleh unsur-unsur di bawah ini:

1. Man : Sumber daya manusia yaitu seluruh pegawai BKK Kelas II Pangkalpinang yang bertugas di kantor induk/wilayah kerja yang terdiri dari dokter, perawat, epidemiolog, sanitarian, entomolog dan pranata laboratorium kesehatan.
2. Machine : Sarana dan Prasarana yang mendukung seperti sarana dan prasarana sanitasi lingkungan seperti sanitarian kit, mikroskop, tensimeter, mesin fogging, laptop, jaringan internet, media komunikasi dan lain-lain.
3. Money : Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini sebesar Rp 544.964.000.
4. Method : Prosedur operasional untuk pencapaian indikator ini merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang, kertas kerja perhitungan capaian indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara.



5. Material : Dokumen yang mendukung dalam kegiatan indikator ini berupa dokumen RKA-KL/DIPA, dokumen RPK/RPD, laporan kegiatan dan data realisasi anggaran dari SAKTI dan OM SPAN.
6. Time : Waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian indikator ini adalah Januari – Desember Tahun 2026

Indikator Kedua : Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01 .07/MENKES/2015/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan

2. Pengertian

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah nilai berdasarkan hasil evaluasi atas rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan, pengklasifian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

3. Definisi Operasional

Hasil evaluasi secara terstruktur dan objektif yang dilakukan oleh Tim SKI untuk mengukur tingkat keberhasilan, konsistensi, dan kualitas Unit Kerja dalam menerapkan SAKIP dalam satu tahun.



4. Rumus / Cara Perhitungan

Indeks Penilaian (Scoring Index) Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam instrumen evaluasi SAKIP yang terdiri dari Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 30%), Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%).

$$\text{Nilai SAKIP} = (30\% \times \text{Perencanaan Kinerja}) + (30\% \times \text{Pengukuran Kinerja}) + (15\% \times \text{Pelaporan Kinerja}) + (25\% \times \text{Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal})$$

5. Capaian Indikator

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

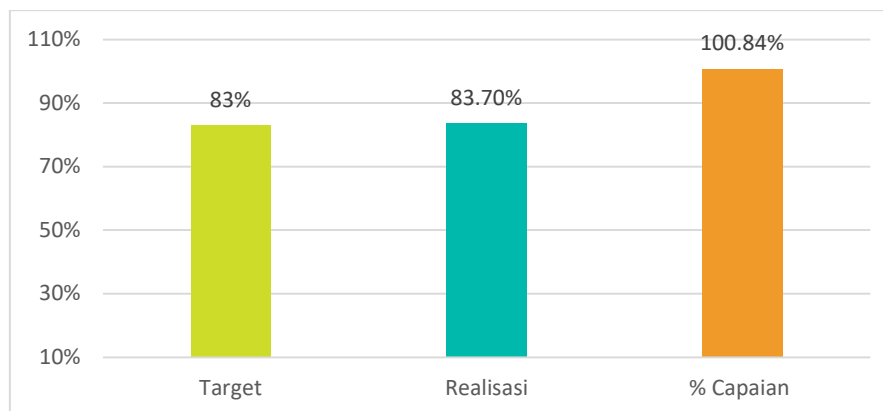
Capaian indikator nilai SAKIP Semester I Tahun 2026 menggunakan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 yang telah direview oleh Tim SKI BKK Kelas II Pangkalpinang pada Tanggal 20 April Tahun 2026 . Hasil Evaluasi Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 83,70 dengan kategori A (Memuaskan). Perbandingan target dengan realisasi kinerja indikator nilai SAKIP dapat dilihat pada dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{83,70\%}{83\%} \times 100\% = 100,84\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SAKIP



Dari grafik di atas terlihat capaian Nilai SAKIP tercapai sebesar 83,70 atau 100,84% dari target yang ditetapkan sebesar 83. Lembar kerja evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Balai Kekarantinaan Kelas II Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai Kekarantinaan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2025	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,60	82,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,4	90,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,2	80,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12	80,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	25,20	84,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6	100,00%

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2025	
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,2	80,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12	80,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,90	86,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	3	100,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,15	70,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	90,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	21,00	84,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	5	100,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6	80,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10	80,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja/ Kategori Predikat			83,70	A

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Indikator Nilai SAKIP merupakan indikator baru pada Rencana Aksi Kegiatan 2025 s.d 2029. Namun nilai SAKIP selalu dievaluasi setiap tahunnya untuk mengukur akuntabilitas kinerja satuan kerja. Perbandingan dengan realisasi nilai SAKIP Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



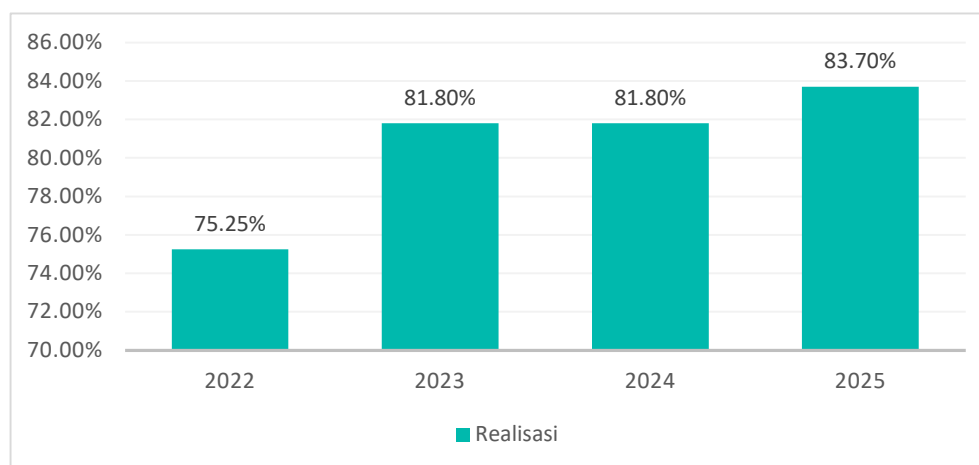
Tabel 3. 6 Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai Kekarantinaan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja				Ket Nilai
			Tahun 2024		Tahun 2025		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,60	82,00%	24,60	82,00%	tetap
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,4	90,00%	5,4	90,00%	
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,2	80,00%	7,2	80,00%	
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12	80,00%	12	80,00%	
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	25,20	84,00%	25,20	84,00%	tetap
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6	100,00%	6	100,00%	
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,2	80,00%	7,2	80,00%	
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12	80,00%	12	80,00%	
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,00	80,00%	12,90	86,00%	naik
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,4	80,00%	3	100,00%	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,6	80,00%	3,15	70,00%	
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6	80,00%	6,75	90,00%	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,00	80,00%	21,00	84,00%	naik
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4	80,00%	5	100,00%	
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6	80,00%	6	80,00%	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10	80,00%	10	80,00%	
Nilai Akuntabilitas Kinerja/ Kategori Predikat			81,80	A	83,70	A	naik



Berdasarkan tabel di atas nilai SAKIP Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2025 sebesar 83,70 mengalami kenaikan sebesar 1,9 poin dibandingkan nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 81,80 . Pada tabel terlihat nilai komponen pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas Tahun 2025 meningkat dibandingkan Tahun 2024.

Grafik 3. 4 Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2022 s.d Tahun 2025



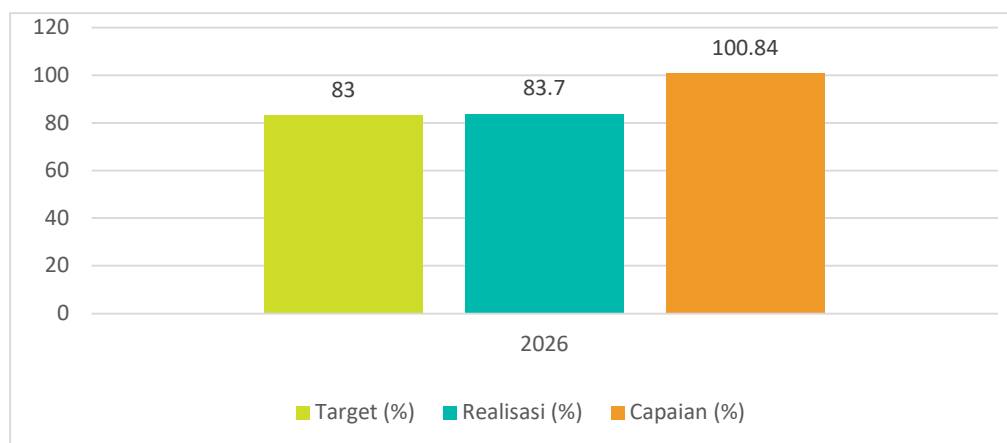
Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Tahun 2022 hingga 2025 cenderung meningkat. Secara umum, kinerja nilai SAKIP menunjukkan tren positif dan berada pada predikat A (memuaskan) serta adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Perbandingan realisasi kinerja nilai SAKIP dengan target RAK Tahun 2026 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP dengan Target RAK



Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja nilai SAKIP sebesar 83,70 berada di atas target RAK Tahun 2026 sebesar 83. Capaian kinerja mencapai 100,84% mengindikasikan bahwa target kinerja terlampaui dan menunjukkan akuntabilitas kinerja pada predikat A (memuaskan).

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi nilai SAKIP dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi nilai SAKIP dengan standar nasional

Indikator RAP	Target RAP	Indikator RAK	Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	83	Nilai SAKIP	83,70

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang berhasil mencapai Nilai SAKIP sebesar 83,70. Nilai tersebut telah melampaui target nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit sebesar 83. Ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BKK Pangkalpinang telah berjalan efektif, mulai dari aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi, hingga

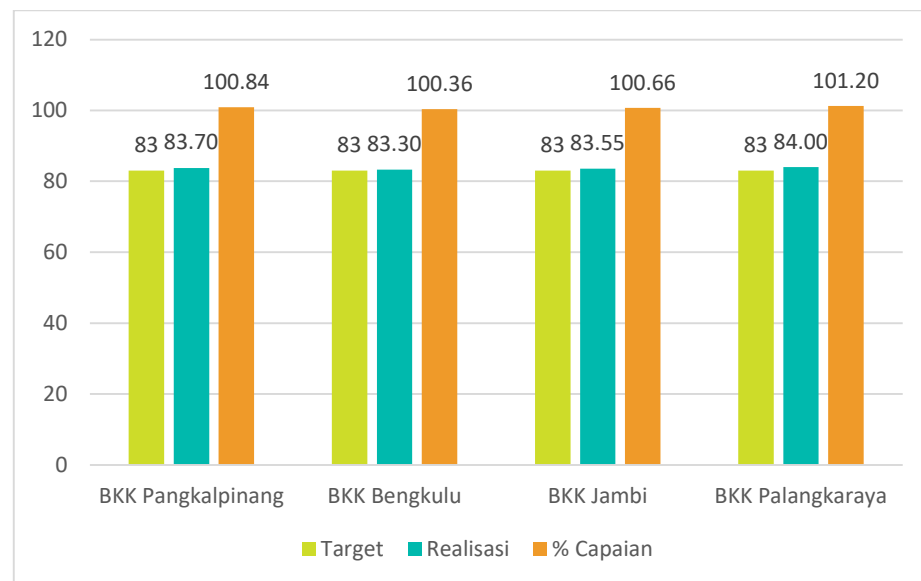


pencapaian sasaran organisasi. Hal ini juga mencerminkan komitmen BKK Pangkalpinang dalam mendukung pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit secara nasional.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Satker Lainnya

Perbandingan realisasi kinerja indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3. 6 Perbandingan realisasi kinerja Nilai SAKIP dengan satker lain



Berdasarkan grafik di atas, Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP dengan Satker Lain, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang berhasil mencapai nilai 83,70 atau 100,84% dari target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit sebesar 83,00. Dibandingkan dengan 3 BKK lain, capaian BKK Pangkalpinang berada pada peringkat ke-2, di bawah BKK Palangkaraya dengan nilai 84,00, dan di atas BKK Jambi 83,55 serta BKK Bengkulu 83,30. Seluruh BKK pembanding telah melampaui target nasional.



6. Upaya yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- a. Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan dan menetapkan target indikator kinerja yang terukur;
- b. Monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala;
- c. Menyusun laporan kinerja yang menyajikan data kinerja yang andal dan analisis capaian, kendala dan tindak lanjut secara komprehensif;
- d. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya secara konsisten dan terdokumentasi;
- e. Mengimplementasikan inovasi “Klik BKK Pangkalpinang” untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- f. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendampingan terkait implementasi SAKIP dan pemanfaatan teknologi informasi.

7. Analisa Penyebab Keberhasilan

- a. Keterlibatan pimpinan langsung dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- b. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja serta penindaklanjutan hasil evaluasi SAKIP;
- c. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara konsisten dan terdokumentasi;
- d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitoring capaian kinerja;
- e. Berdasarkan surat Plt Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tanggal 07 April Tahun 2026 perihal Penetapan Inovasi Unit Kerja/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit , inovasi SAKIP dari BKK Pangkalpinang berupa aplikasi “KLIK BKK Pangkalpinang” dengan jenis inovasi teknologi sistem informasi dan pelayanan publik memenuhi kriteria inovasi “dapat dihargai” sehingga menambah poin sebesar 0,5 poin pada nilai komponen SAKIP Kualitas dan pemanfaatan pelaporan kinerja Tahun 2025.
- f.

8. Kendala yang Dihadapi



- a. Koordinasi dan penanggungjawaban seluruh proses SAKIP terpusat pada 1-3 pengelola;
- b. SDM yang telah mengikuti diklat/pelatihan SAKIP/LAKIP masih terbatas;
- c. Capaian indikator kinerja persentase realisasi anggaran tidak tercapai karena adanya kebijakan pemblokiran anggaran sehingga realisasi anggaran terhadap pagu total tidak tercapai.

9. Pemecahan Masalah yang Bisa Dilakukan

- a. Dilakukan pembagian tugas secara internal kepada pegawai terkait yang meliputi penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pengelolaan inovasi “Klik BKK Pangkalpinang”;
- b. Mengikutsertakan SDM ke dalam diklat/pelatihan SAKIP/LAKIP;
- c. Menyajikan data capaian kinerja dengan menggunakan pagu efektif agar perhitungan realisasi kinerja indikator persentase realisasi anggaran tercapai sesuai target.

10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Efisiensi berada pada range -20 sd 20. Minus 20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya efisien.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E = Efisiensi

PAKi = Alokasi per Indikator

CKi = Persen Capaian Indikator

RAKi = Realisasi Anggaran per Indikator



Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{((96.386.000 \times 1,01) - 7.500.000)}{96.386.000 \times 1,01} \times 100 \% = \mathbf{0,92}$$

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Untuk sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan indikator kinerja kegiatan nilai SAKIP dapat tercapai sebesar 83,70 dari target 83 dengan persentase capaian sebesar 100,84% dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- atau 7,78% dari pagu efektif sebesar Rp. 96.386.000,-. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, efisiensi berada pada 0,92 yang berarti indikator nilai kinerja anggaran berjalan efisien dengan anggaran 7,78% dapat mencapai kinerja 100,84%.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, dipengaruhi oleh unsur-unsur di bawah ini:

1. Man : Sumber daya manusia berasal dari petugas BKK Pangkalpinang yang bertugas di wilayah kerja maupun di kantor induk.
2. Machine : Sarana dan Prasarana yang mendukung seperti sarana dan prasarana dan alat pendukung seperti laptop, jaringan internet, media komunikasi dan lain-lain.
3. Money : Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini sebesar Rp 96.386.000.
4. Method : Prosedur operasional untuk pencapaian indikator ini merujuk PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Material : Dokumen yang mendukung dalam kegiatan indikator ini berupa dokumen perencanaan kinerja, dokumen pengukuran kinerja, dokumen pelaporan kinerja dan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja.
6. Time : Waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian indikator ini adalah Januari – Desember Tahun 2026



Indikator Ketiga : Nilai Kinerja Anggaran

1. Dasar Hukum

- a. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- c. PMK Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 27/MK/AG/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

2. Pengertian

Adalah instrumen pengukuran untuk menilai keberhasilan, efisiensi, dan kualitas pengelolaan anggaran suatu instansi atau satuan kerja dalam menggunakan APBN.

3. Definisi Operasional

Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi e Monev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari:

1. Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK dan/atau efisiensi SBK
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III



DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang

Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan capaian output.

4. Rumus / Cara Perhitungan

Hasil penjumlahan 50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA).


$$\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = \text{Perencanaan Anggaran (50\%)} + \text{Pelaksanaan Anggaran (50\%)}$$

5. Capaian Indikator

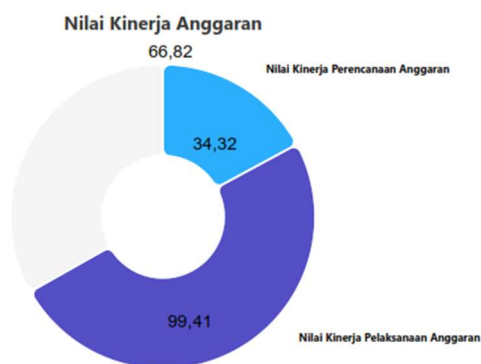
a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Nilai kinerja anggaran diperoleh dari aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini

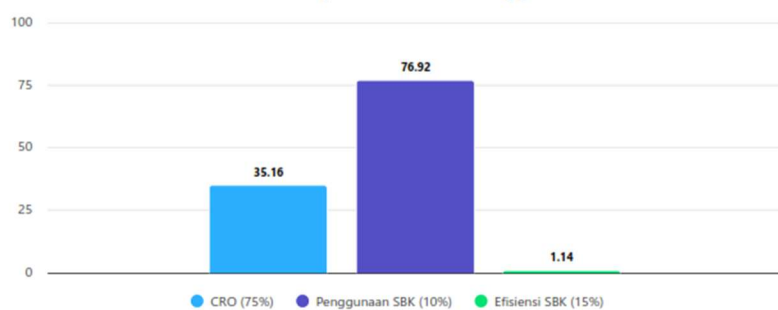
Gambar 3. 1 Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas II Pangkalpinang Semester I Tahun 2026

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	024.05.415944	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II PANGKAL PINANG	34,23	99,41	66,82

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri



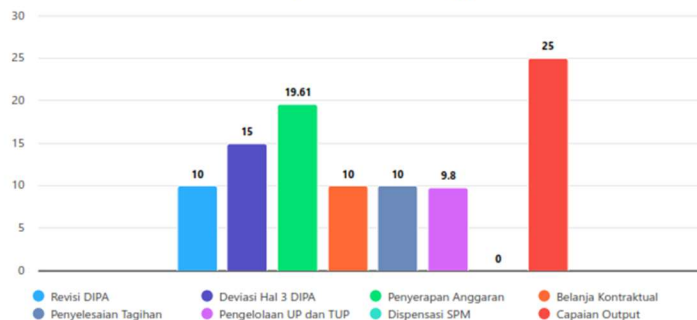
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



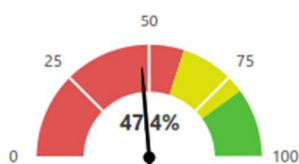
*Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk mei.....



Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Progress Rincian Output



47.40 adalah Rata-rata progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja Balai kekarantinaan kesehatan kelas ii pangkal pinang

Pagu dan Realisasi Anggaran



Sumber Data : <https://monev.kemenkeu.go.id/> (cut off per tanggal 10 Juli 2026)

Berdasarkan gambar di atas, nilai kinerja anggaran BKK Kelas II Pangkalpinang tercapai sebesar 66,82 termasuk ke dalam kategori “cukuo” dengan perincian nilai setiap variable adalah sebagai berikut :

- Nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 34,32 (terdiri dari :
 - Nilai CRO sebesar 35,16
 - Penggunaan SBK sebesar 76,92
 - Efisiensi SBK sebesar 1,14

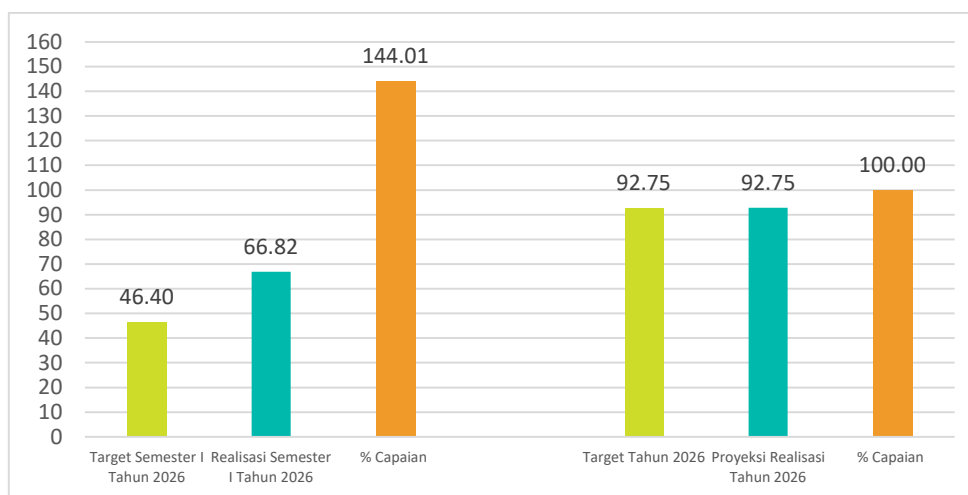


- b. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 97,10 terdiri dari
- a. Revisi DIPA sebesar 10
 - b. Deviasi halaman 3 DIPA sebesar 15
 - c. Penyerapan anggaran sebesar 19,61
 - d. Belanja kontraktual sebesar 10
 - e. Penyelesaian tagihan sebesar 10
 - f. Pengelolaan UP dan TUP sebesar 9,8
 - g. Capaian output sebesar 25

Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang jika dibandingkan dengan target Semester I Tahun 2026 dapat dilihat pada perhitungan berikut ini :

$$\frac{66,82}{48,27} \times 100 \% = 144,01\%$$

Grafik 3. 7 Target , Realisasi dan Proyeksi Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang



Berdasarkan grafik di atas, Semester I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target Nilai Kinerja Anggaran Semester I sebesar 46,40, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 66,82 atau dengan tingkat capaian 144,01%. Capaian tersebut telah melampaui target yang



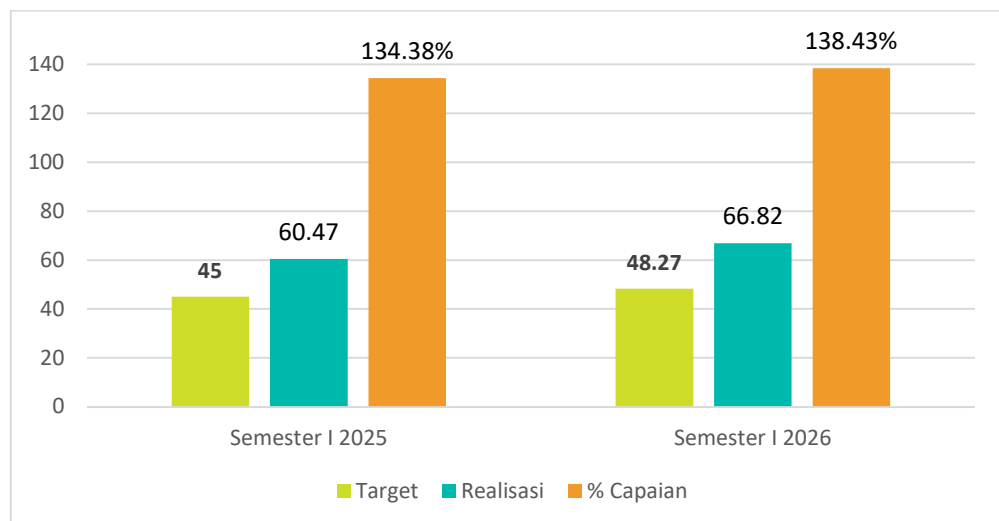
ditetapkan pada semester I. Sejalan dengan capaian semester I tersebut, dengan target Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2026 sebesar 92,75, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang memproyeksikan realisasi sampai dengan akhir tahun 2026 dapat mencapai 92,75. Dengan demikian, proyeksi capaian Nilai Kinerja Anggaran pada akhir Tahun 2026 adalah sebesar 100,00%.

Hal ini menunjukkan optimisme bahwa target kinerja anggaran tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran secara efektif dan efisien.

b. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan per Tahun 2026 masih sama dengan Tahun 2025. Perbandingan realisasi kinerja indikator ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 8 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Semester I Tahun 2025 dan 2026



Berdasarkan grafik di atas terjadi peningkatan Nilai Kinerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang pada Semester I Tahun 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada

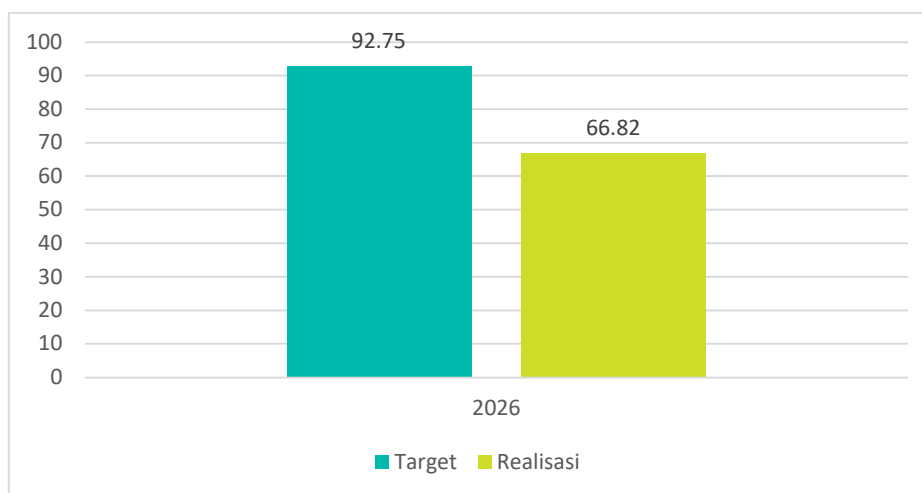


Semester I Tahun 2025, Nilai Kinerja Anggaran tercatat sebesar 60,47. Sementara pada Semester I Tahun 2026, nilai tersebut meningkat menjadi 66,82. Dengan demikian terdapat peningkatan sebesar 6,35 poin atau tumbuh sebesar 10,50% year on year. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan penyerapan anggaran pada Semester I Tahun 2026 berjalan lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran dengan target RAK 2025 – 2029 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK



Berdasarkan grafik di atas, perbandingan antara Target RAK dengan Realisasi nilai kinerja anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2026 menunjukkan progres yang sangat baik. Target Nilai Kinerja Anggaran yang ditetapkan dalam RAK Tahun 2026 adalah sebesar 92,75. Sampai dengan Semester I Tahun 2026, realisasi yang telah dicapai adalah sebesar 66,82 atau 72,00% dari target tahunan. Capaian sebesar 72,00% pada semester I ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran berjalan lebih cepat dari rencana yang telah ditetapkan dalam RAK. Dengan sisa target sebesar 25,93 yang harus



dicapai pada Semester II, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang optimis dapat mencapai target Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2026 sebesar 92,75 atau 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2026 :

Tabel 3. 8 Hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2026

Indikator RAP	Target RAP	Indikator RAK	Realisasi Kinerja
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	92,75	Nilai SAKIP	66,82

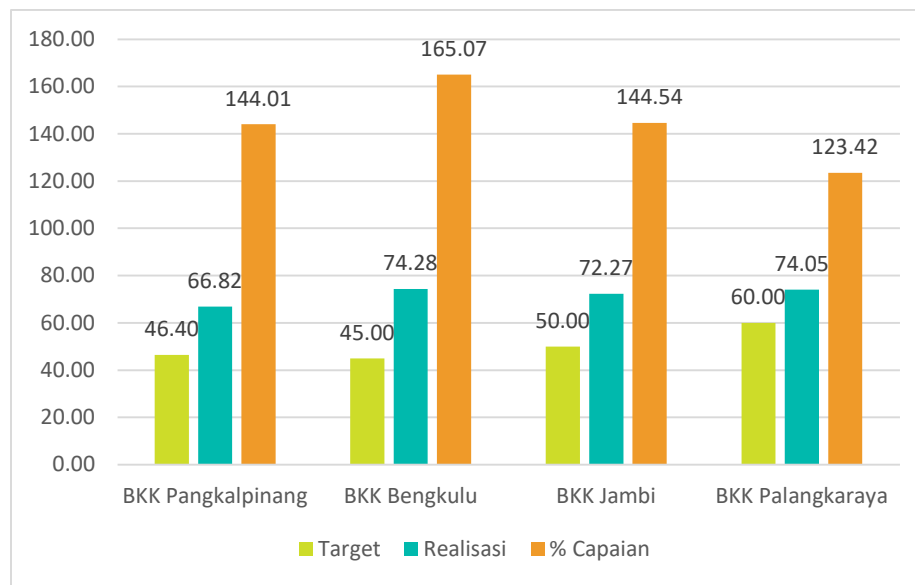
Dilihat dari tabel di atas, realisasi Nilai Kinerja Anggaran BKK Pangkalpinang mencapai 66,82. Capaian tersebut merupakan 72,02% dari target akhir tahun yang ditetapkan dalam RAP Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit sebesar 92,75. Meskipun realisasi belum mencapai target tahunan, capaian Semester I ini telah melampaui proporsi waktu 50%. Untuk mencapai target akhir tahun sebesar 92,75, BKK Pangkalpinang perlu melakukan akselerasi pada penyerapan anggaran, peningkatan efisiensi, dan penguatan kualitas output kegiatan pada Semester II Tahun 2026.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Satker Lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator nilai kinerja anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dengan satker lainnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik 3. 10 Perbandingan realisasi kinerja indikator nilai kinerja anggaran dengan satker lain



Berdasarkan grafik di atas, realisasi Nilai Kinerja Anggaran BKK Pangkalpinang Tahun 2025 mencapai 66,82 atau 144,01% dari target sebesar 46,40. Capaian ini menunjukkan bahwa BKK Pangkalpinang telah melampaui target yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan 3 BKK lain, realisasi BKK Pangkalpinang berada pada peringkat ke-4. Peringkat pertama ditempati BKK Bengkulu dengan realisasi 74,28, disusul BKK Palangkaraya 74,05 dan BKK Jambi 72,27. Meskipun demikian, persentase capaian BKK Pangkalpinang 144,01% berada di peringkat ke-3, di atas BKK Palangkaraya. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran di BKK Pangkalpinang sudah efektif, namun masih perlu peningkatan pada kualitas output dan efisiensi untuk mengejar capaian satker lain.

6. Upaya yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran secara berkala sehingga setiap kegiatan yang telah dianggarkan dalam RKA-KL terlaksana dan menghasilkan output sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- Memanfaatkan kesempatan pengajuan/pemutakhiran revisi halaman III DIPA di setiap triwulan sehingga konsistensi penarikan dana sesuai dengan rencana penarikan danan yang telah dibuat;



- c. Melakukan perhitungan rencana penarikan dana secara sistematis dan terukur;
- d. Realisasi anggaran dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan output kegiatan yang telah ditetapkan
- e. Tepat waktu melakukan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulannya;
- f. Kerja sama dan komunikasi yang baik antar seluruh SDM yang ada di BKK Kelas II Pangkalpinang yang sudah bekerja secara profesional serta memanfaatkan segala sarana, prasarana serta anggaran dengan optimal dengan tetap mengedepankan prinsip anggaran yang efektif dan efisien serta berbasis kinerja;

7. Analisa Penyebab Keberhasilan

- a. Realisasi Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan secara berkala untuk memastikan progres kegiatan dan realisasi anggaran sesuai target;
- b. Penggunaan SBK sesuai ketentuan penilaian yang telah ditetapkan
- c. Revisi DIPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- d. Penyerapan anggaran terealisasi sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan dari kementerian keuangan (pada aplikasi MyIntress);
- e. Realisasi RO SBK yang dihasilkan atas penggunaan anggaran masih dalam kategori efisien (efisiensi SBK);
- f. Koordinasi yang efektif antara bagian perencanaan, keuangan, dan teknis memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran;
- g. Penggunaan sistem informasi dan aplikasi pelaporan anggaran dimaksimalkan untuk meningkatkan akurasi data dan ketepatan waktu pelaporan

8. Kendala yang Dihadapi

- a. Realisasi anggaran beberapa kegiatan masih belum optimal karena menunggu kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
- b. Perubahan kebijakan dan regulasi terkait blokir anggaran di tengah tahun anggaran memerlukan penyesuaian kegiatan dan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan;



- c. Maksimum Pencairan (MP) PNBП Tahap II belum biasa diajukan karena realisasi PNBП satker belum mencapai 60% sehingga berdampak pada tertundanya realisasi anggaran kegiatan Debarkasi Haji Tahun 2026.

9. Pemecahan masalah yang bisa dilakukan

- a. Komitmen pengelola program dan pelaksana kegiatan untuk memastikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
- b. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang anggaran nya tidak terblokir untuk mendukung penyerapan anggaran satker dan pencapaian target rincian output;
- c. Memproses pengajuan Pencairan (MP) PNBП Tahap II Tahun 2026 di awal Juli untuk mendukung percepatan realisasi anggaran sumber dana PNBП.

10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Efisiensi berada pada range -20 sd 20. Minus 20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya efisien

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E = Efisiensi

PAKi = Alokasi per Indikator

CKi = Persen Capaian Indikator

RAKi = Realisasi Anggaran per Indikator

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{((17.560.000 \times 1,44) - 3.674.700)}{17.560.000 \times 1,44} \times 100 \% = 0,85$$



Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Untuk sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran dapat tercapai sebesar 66,82 atau 144,01% dari target Semester I Tahun 2026 sebesar 46,40 dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.3.674.700,- atau 20,93% dari pagu efektif sebesar Rp. 17.560.000,-. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, efisiensi berada pada 0,85 yang berarti indikator nilai kinerja anggaran berjalan efisien dengan anggaran 20,93% dapat menacapai kinerja 144,01%.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, dipengaruhi oleh unsur-unsur di bawah ini:

1. Man : Sumber daya manusia berasal dari tim keuangan, tim money, tim perencanaan, pemegang program Tim Kerja 1 – 5, Tim PI eselon I , KPPN Pangkalpinang dan Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung.
2. Machine : Sarana dan Prasarana yang mendukung seperti laptop, jaringan internet dan media komunikasi.
3. Money : Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini sebesar Rp 17.560.000.
4. Method : Prosedur operasional untuk pencapaian indikator ini merujuk pada KMK Nomor 466 Tahun 2023 adalah pedoman teknis pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran.
5. Material : Dokumen yang mendukung dalam kegiatan indikator ini berupa dokumen RKA-KL/DIPA, dokumen RPK/RPD, laporan capaian output dan data realisasi anggaran dari SAKTI dan OMP SPAN.
6. Time : Waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian indikator ini adalah Januari – Desember Tahun 2026.

Indikator Ketiga : Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti



1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Pengertian

Adalah indikator yang mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja dalam melaksanakan seluruh saran perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Semakin tinggi persentasenya, semakin akuntabel dan patuh entitas tersebut dalam mengelola keuangan negara.

3. Definisi Operasional

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap.

4. Rumus / Cara Perhitungan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dapat diukur dengan rumus dan cara perhitungan berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I pada hasil monitoring tahun berjalan yang telah dinyatakan lengkap}}{\text{jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Unit Eselon I}} \times 100\%$$

5. Capaian Indikator

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

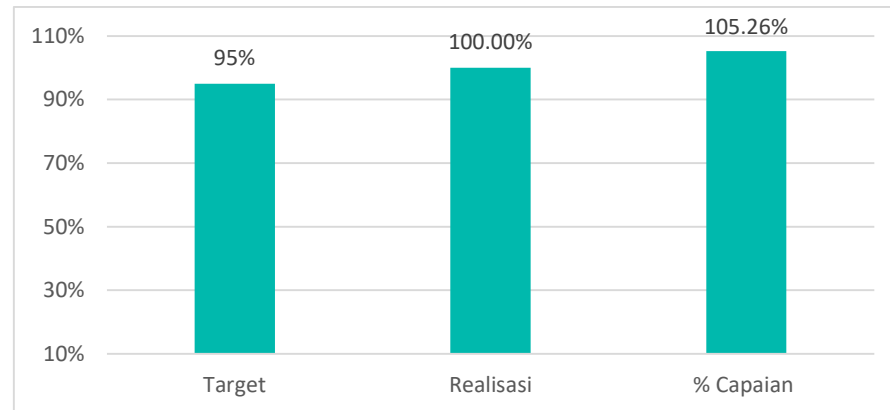
Capaian indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti :

$$\frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105,26\%$$



Perbandingan target dan realisasi capaian indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti



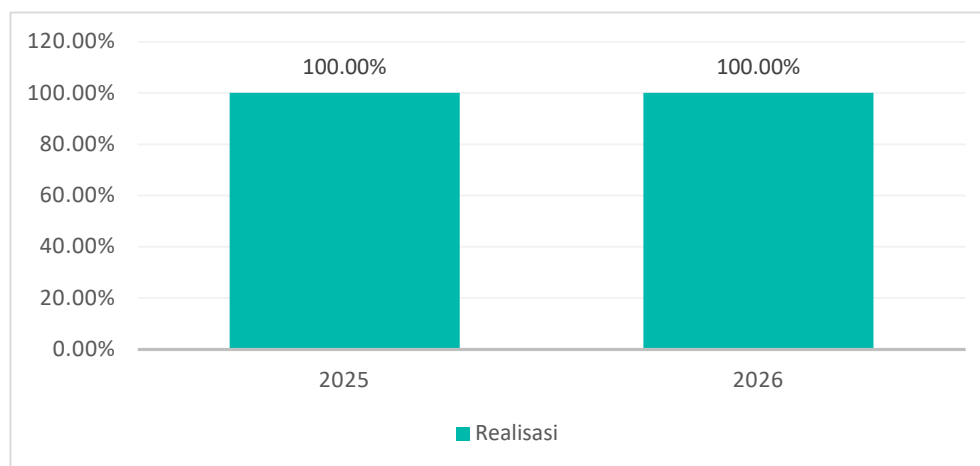
Dari grafik di atas Realisasi indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti Semester I Tahun 2026 mencapai 100% atau 105,26% dari target 95%. Capaian 100% tersebut dikarenakan BKK Pangkalpinang bukan merupakan satker sampel pemeriksaan BPK Tahun 2025, sehingga tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan dengan realisasi persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Tahun 2025 dengan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Grafik 3. 12 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti Tahun 2025 dan Tahun 2026

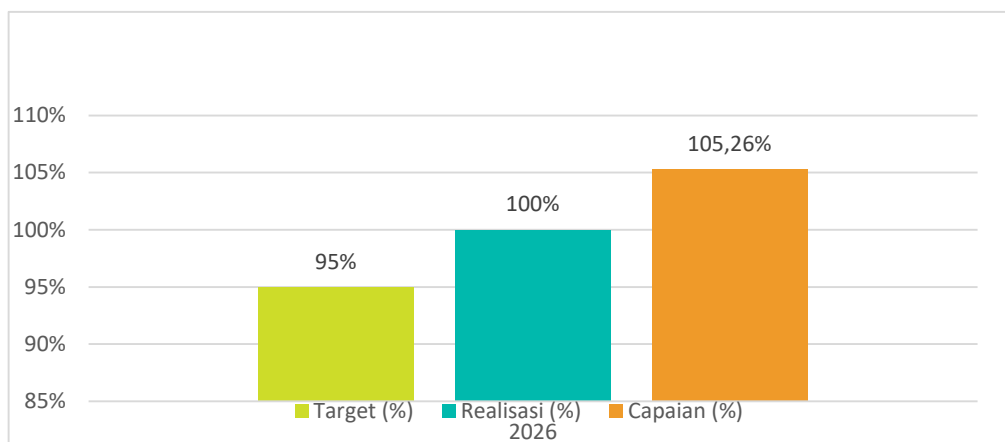


Dari grafik di atas, perbandingan realisasi indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti Tahun 2025 dan Tahun 2026. Realisasi pada kedua tahun tersebut sama-sama mencapai 100,00%. Capaian 100% ini terjadi karena BKK Pangkalpinang bukan merupakan satker sampel pemeriksaan BPK pada Tahun 2025 maupun Tahun 2026, sehingga tidak terdapat rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Perbandingan realisasi kinerja nilai SAKIP dengan target RAK Tahun 2026 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dengan Target RAK



Tabel diatas menunjukkan realisasi indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BKK Pangkalpinang Tahun 2026 mencapai 100% dari target RAK sebesar 95%. Dengan demikian persentase capaian kinerja sebesar 105,26%. BKK Pangkalpinang bukan merupakan satker sampel pemeriksaan BPK Tahun 2026, sehingga tidak terdapat rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 9 Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dengan standar nasional

Indikator RAP	Target RAP	Indikator RAK	Realisasi Kinerja
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	95%	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	100%

Realisasi indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BKK Pangkalpinang Tahun 2026 mencapai 100%. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam RAP Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit sebesar 95%, atau mencapai 105,26%. BKK Pangkalpinang bukan merupakan satker sampel pemeriksaan

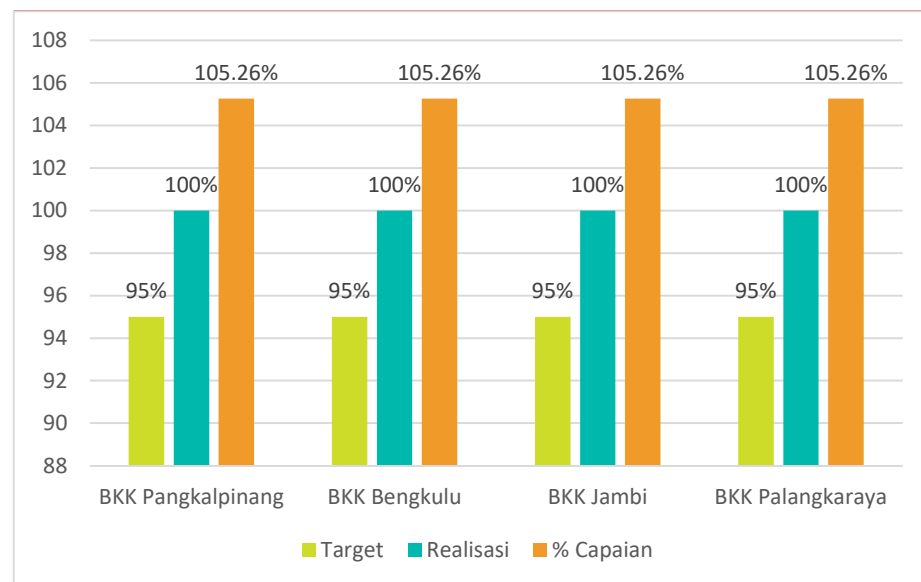


BPK, sehingga tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Capaian ini menunjukkan bahwa BKK Pangkalpinang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target nasional Ditjen P2.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Satker Lainnya

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dengan satker lainnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dengan Satker Lain



Berdasarkan grafik di atas, realisasi indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti Tahun 2026 menunjukkan hasil yang seragam pada 4 BKK. BKK Pangkalpinang, BKK Bengkulu, BKK Jambi, dan BKK Palangkaraya sama-sama mencapai realisasi 100% dari target sebesar 95%, atau dengan % capaian 105,26%. Hal ini menunjukkan bahwa keempat BKK telah melampaui target dan memiliki kinerja tata kelola yang setara. Untuk BKK Pangkalpinang, capaian 100%



tersebut dikarenakan bukan merupakan satker sampel pemeriksaan BPK, sehingga tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

6. Upaya yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- a. Penguatan Sistem Pengendalian Intern melalui reviu internal rutin dan tindak lanjut tuntas terhadap temuan APIP ;
- b. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkala;

7. Analisa Penyebab Keberhasilan

- a. Pimpinan BKK Pangkalpinang secara konsisten menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan dan BMN;
- b. Bukti dukung kegiatan, keuangan, dan aset dikelola dengan tertib dan sesuai kaidah kearsipan;
- c. Pemahaman terhadap regulasi terbaru seperti PMK dan SE membuat pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.

8. Kendala yang Dihadapi

- a. Pengelola keuangan, BMN, dan administrasi sering merangkap tugas teknis lain. Hal ini berpotensi mengurangi fokus dalam penatausahaan dan dokumentasi bukti dukung.

9. Pemecahan Masalah yang Bisa Dilakukan

- a. Dilakukan Optimalisasi Tenaga Administrasi dengan memberdayakan CPNS/PPPK baru atau tenaga kontrak untuk membantu pekerjaan pengetikan, filing, dan scan bukti dukung agar pengelola inti bisa fokus pada substansi.

10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Efisiensi berada pada range -20 sd 20. Minus 20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya efisien.



$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E = Efisiensi

PAKi = Alokasi per Indikator

CKi = Persen Capaian Indikator

RAKi = Realisasi Anggaran per Indikator

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{((0 \times 1,05) - 0)}{0 \times 1,05} \times 100 \% = 0$$

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dapat tercapai sebesar 105,26% dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 0 berarti indikator ini berjalan efisien dengan anggaran 0% dapat mencapai kinerja 105,26%.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, dipengaruhi oleh unsur-unsur di bawah ini:

1. Man : Sumber daya manusia berasal dari petugas BKK Pangkalpinang yang bertugas di wilayah kerja maupun di kantor induk.
2. Machine : Sarana dan Prasarana yang mendukung seperti sarana dan prasarana dan alat pendukung seperti laptop, jaringan internet, media komunikasi dan lain-lain.
3. Money : Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini sebesar Rp 0.



4. Method : Prosedur operasional untuk pencapaian indikator ini merujuk pada hasil Monitoring Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK di Eselon I.
5. Material : Dokumen yang mendukung dalam kegiatan indikator ini berupa dokumen RKA-KL/DIPA, dokumen RPK/RPD, laporan kegiatan, dokumen pertanggungjawaban keuangan, dokumen pengadaan dan data realisasi anggaran dari SAKTI dan OM SPAN.
6. Time : Waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian indikator ini adalah Januari – Desember Tahun 2026

Indikator Kelima : Persentase Realisasi Anggaran

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. PMK Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

2. Pengertian

Persentase realisasi anggaran adalah persentase anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap alokasi anggaran yang sudah ditetapkan untuk satu tahun anggaran.

3. Definisi Operasional

Perbandingan antara realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu yang ditetapkan.

4. Rumus/Cara Perhitungan

Persentase realisasi anggaran dapat diukur dengan rumus dan cara perhitungan berikut :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Total Pagu Anggaran yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

5. Capaian Indikator

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan Petikan DIPA nomor SP DIPA- 024.05.2.415944/2026 tanggal 01 Desember 2025, Pagu anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang ditetapkan sebesar Rp. 14.616.349.000. Rincian anggaran per jenis belanja dan sumber dana dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3. 10 Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja per 30 Juni 2026

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Blokir	Total
1	Belanja Pegawai	10.641.604.000	0	10.641.604.000
2	Belanja Barang	3.477.252.000	0	3.477.252.000
3	Belanja Modal	0	0	0
Total		14.118.856.000	0	14.118.856.000

Tabel 3. 11 Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana per 30 Juni 2026

No	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Blokir	Total
1	Rupiahn Murni (RM)	12.957.913.000	0	12.957.913.000
2	PNBP	1.160.943.000	0	1.160.943.000
Total		14.118.856.000	0	14.118.856.000

Berdasarkan tabel di atas, Pagu anggaran tahun 2026 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang ditetapkan sebesar **Rp 14.118.856.000** dengan komposisi terbesar pada Belanja Pegawai yaitu **Rp 10.641.604.000**, diikuti Belanja Barang sebesar **Rp 3.477.252.000**, sedangkan belanja modal tidak dialokasikan. Berdasarkan sumber dana, anggaran bersumber dari Rupiah Murni (**RM**) sebesar Rp12.957.913.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (**PNBP**) sebesar **Rp1.160.943.000**. Tidak terdapat anggaran yang diblokir sehingga seluruh pagu dapat direalisasikan.



Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja per 30 Juni 2026

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	10.641.604.000	5.489.123.185	51,58%
2	Belanja Barang	3.477.252.000	1.325.959.028	38,13%
3	Belanja Modal	0		
Total		14.118.856.000	6.815.082.213	48,27%

Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana per 30 Juni 2026

No	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	RM	12.957.913.000	6.388.819.516	49,30%
2	PNBP	1.160.943.000	426.262.697	36,72%
Total		14.118.856.000	6.815.082.213	48,27%

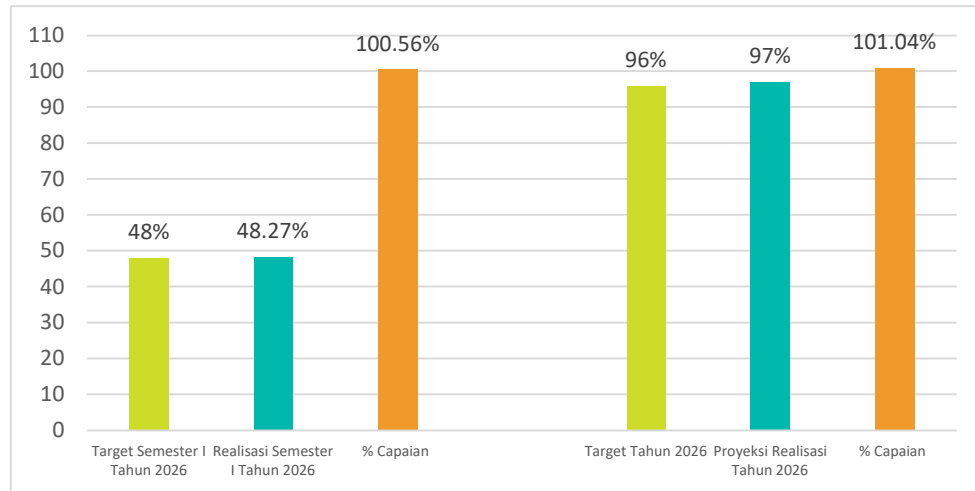
Sampai dengan 30 Juni 2026, realisasi anggaran mencapai Rp6.815.082.213 atau 48,27% dari pagu anggaran sebesar Rp14.118.856.000. Berdasarkan jenis belanja, realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp5.489.123.185 atau 51,58% dari pagu Rp10.641.604.000. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.325.959.028 atau 38,13% dari pagu Rp3.477.252.000. Sementara Belanja Modal tidak dianggarkan pada tahun 2026. Berdasarkan sumber dana, realisasi yang bersumber dari RM sebesar Rp6.388.819.516 atau 49,30% dari pagu Rp12.957.913.000. Sedangkan realisasi yang bersumber dari PNBP sebesar Rp426.262.697 atau 36,72% dari pagu Rp1.160.943.000. Secara umum realisasi anggaran semester I tahun 2026 masih berada di bawah 50%. Hal ini disebabkan realisasi Belanja Barang yang masih relatif rendah.

Capaian indikator persentase realisasi anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Semester I Tahun 2026 dapat dilihat pada perhitungan berikut ini:

$$\frac{48,27\%}{48\%} \times 100\% = 100,56\%$$



Grafik 3. 15 Target , Realisasi dan Proyeksi Capaian Persentase Realisasi Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang



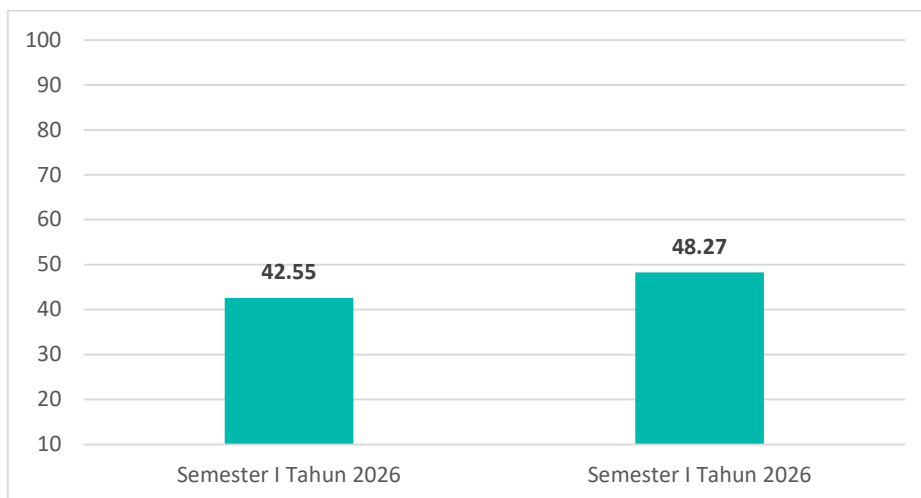
Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator persentase realisasi anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang pada Semester I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang baik. Target realisasi anggaran semester I sebesar 48% dapat terealisasi sebesar 48,27%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,56%. Hal ini berarti realisasi anggaran pada semester I telah melampaui target yang ditetapkan. Untuk target tahun 2026 sebesar 96%, diproyeksikan realisasi anggaran dapat mencapai 97%. Dengan proyeksi tersebut maka capaian kinerja akhir tahun diperkirakan sebesar 101,04%. Proyeksi ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran diprediksi dapat melebihi target yang telah ditetapkan di akhir tahun. Secara umum grafik tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana dan memiliki tren positif. Realisasi semester I yang telah melebihi target serta proyeksi realisasi akhir tahun yang lebih tinggi dari target menunjukkan upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran telah berjalan efektif. Ke depan perlu terus dijaga konsistensi pelaksanaan kegiatan, khususnya pada Belanja Barang dan percepatan realisasi PNBK, agar proyeksi capaian 101,04% dapat direalisasikan sesuai rencana.



b. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian indikator persentase realisasi anggaran dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3. 16 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026



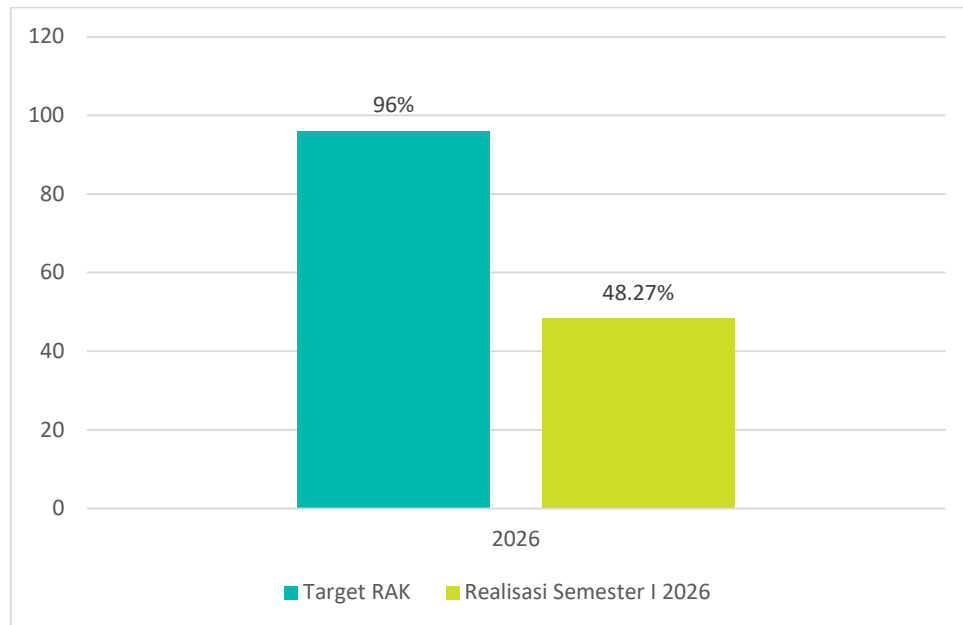
Berdasarkan grafik di atas, terjadi peningkatan capaian persentase realisasi anggaran pada Semester I Tahun 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Semester I Tahun 2025 realisasi anggaran mencapai 42,55%, sedangkan pada Semester I Tahun 2026 realisasi meningkat menjadi 48,27%. Dengan demikian terdapat kenaikan sebesar 5,72 poin dibandingkan tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kinerja penyerapan anggaran pada semester I tahun 2026 lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan administrasi keuangan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK



Perbandingan realisasi kinerja indikator persentase realisasi anggaran dengan target RAK Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK



Berdasarkan grafik di atas, realisasi kinerja indikator persentase realisasi anggaran pada Semester I Tahun 2026 sebesar 48,27% dibandingkan dengan Target RAK Tahun 2026 sebesar 96%. Dengan demikian, realisasi semester I telah mencapai 50,28% dari target RAK tahunan. Capaian sebesar 48,27% pada semester I menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target RAK sebesar 96%. Hal ini sejalan dengan pola umum penyerapan anggaran yang umumnya lebih rendah pada semester I dan meningkat pada semester II. Untuk mencapai target RAK sebesar 96% di akhir tahun 2026, masih diperlukan realisasi tambahan sebesar 47,73% pada semester II. Oleh karena itu diperlukan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya pada Belanja Barang serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar target RAK Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.



d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja persentase realisasi anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dengan standar nasional yaitu persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 14 Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit

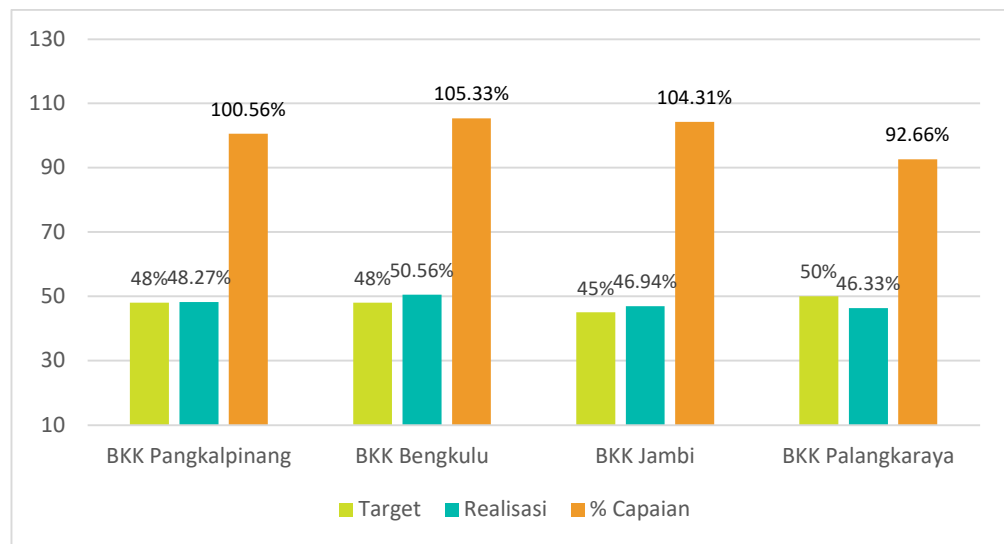
Indikator RAP	Target	Indikator RAK	Capaian BKK Pangkalpinang
Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	96%	Persentase realisasi anggaran	48,27%

Realisasi indikator Persentase Realisasi Anggaran BKK Pangkalpinang sampai dengan Semester I Tahun 2026 mencapai 48,27% atau 50,28% dari target akhir tahun sebesar 96%. Untuk mencapai target 96% di akhir tahun, BKK Pangkalpinang akan melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan, percepatan proses pengadaan, dan monitoring intensif agar tidak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun yang berpotensi menyebabkan target tidak tercapai.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Satker Lainnya

Perbandingan persentase realisasi anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Semester I Tahun 2026 dengan satker lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Grafik 3. 18 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran dengan Satker Lain



Berdasarkan grafik di atas, realisasi anggaran BKK Pangkalpinang Tahun 2026 mencapai 48,27% dari target semester 1 sebesar 48%, atau dengan capaian 100,56%. Dibandingkan dengan BKK lain, BKK Pangkalpinang berada pada peringkat 2 setelah BKK Bengkulu dengan capaian 105,33%. Capaian di atas 100% menunjukkan bahwa BKK Pangkalpinang telah berhasil melampaui target penyerapan anggaran semester I Tahun 2026.

6. Upaya yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran secara berkala sehingga setiap kegiatan yang telah dianggarkan dalam RKA-KL terlaksana dan menghasilkan output sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- Percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber rupiah murni;
- Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan secara tepat waktu.
- Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Satker mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang tidak bergantung pada pembukaan blokir anggaran, sehingga penyerapan anggaran dapat tetap berjalan sejak awal tahun anggaran dan mendukung capaian indikator kinerja;
- Penyusunan RPK-RPD disusun secara terukur dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, termasuk mengantisipasi percepatan realisasi apabila pagu blokir telah dibuka;



- f. Koordinasi dengan unit eselon terkait, Biro Perencanaan, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk percepatan proses administrasi pembukaan blokir anggaran jika memungkinkan, sehingga anggaran yang diblokir dapat segera direalisasikan.

7. Analisa Penyebab Keberhasilan

- a. Hal ini Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana disusun sejak awal tahun sesuai dengan siklus kegiatan teknis kekarantinaan;
- b. Pembayaran gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya dilakukan tepat waktu setiap bulan sehingga menjadi penopang utama capaian realisasi anggaran semester I;
- c. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa baik sumber dana Rupiah Murni (RM) maupun sumber dana PNBPN;
- d. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan tindak lanjut langsung terhadap kendala pencairan menyebabkan penyerapan anggaran dapat terjaga dan mencapai target yang ditetapkan.

8. Kendala yang dihadapi

- a. Ketidakpastiannya kebijakan/penetapan pembukaan Blokir pada semester I sehingga DIPA buka blokir baru terbit akhir Juni 2026;
- b. Ketidaksesuaian RPK-RPD yang telah disusun baik pada semester II yang tidak bisa maksimal baik bersumber RM dan PNBPN, dimana yang bersumber PNBPN tidak maksimal karena batas MP yang telah ditentukan.

9. Pemecahan masalah yang bisa dilakukan

- a. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan segera setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk mendukung penyerapan anggaran;
- b. Memproses pengajuan Maksimum Pencairan (MP) PNBPN tahap II di awal Juli Tahun 2026.



9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Efisiensi berada pada range -20 sd 20. Minus 20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya efisien

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E = Efisiensi

PAKi = Alokasi per Indikator

CKi = Persen Capaian Indikator

RAKi = Realisasi Anggaran per Indikator

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{((12.957.913.000 \times 1,01) - 6.388.819.516)}{12.957.913.000 \times 1,01} \times 100\% = 0,51$$

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Untuk sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, persentase realisasi anggaran dapat tercapai sebesar 66,82% atau 100,56% dari target Semester I Tahun 2026 dan apabila dibandingkan dengan pagu efektif indikator ini sebesar Rp 12.957.913.000 maka indikator persentase realisasi anggaran berjalan efisien karena dengan anggaran 49,30% dapat mencapai kinerja 100,56%.



Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, dipengaruhi oleh unsur-unsur di bawah ini:

1. Man : Sumber daya manusia berasal dari tim monev, tim keuangan, tim perencanaan, pemegang program Tim Kerja 1 – 5, Tim PI eselon I, KPPN Pangkalpinang dan Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung.
2. Machine : Sarana dan Prasarana yang mendukung seperti laptop, jaringan internet dan media komunikasi.
3. Money : Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini sebesar Rp 12.957.913.000.
4. Method : Prosedur operasional untuk pencapaian indikator ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
5. Material : Dokumen yang mendukung dalam kegiatan indikator ini berupa DIPA, RKA-K/L, laporan Fa 16 detail dari aplikasi SAKTI, data realisasi anggaran aplikasi OM SPAN.
6. Time : Waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian indikator ini adalah Januari – Desember Tahun 2026.



Indikator Keenam : Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang Dari

2 x 24 Jam

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sanitasi Kapal;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang KLB Wabah dan Krisis Kesehatan;
- g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk Serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- j. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

2. Pengertian

Adalah Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan adalah proses penerbitan dokumen resmi oleh petugas kekarantinaan kesehatan sebagai bukti bahwa alat angkut telah menjalani pemeriksaan dan memenuhi



ketentuan yang berlaku. Alat Angkut meliputi sarana transportasi seperti kapal, pesawat udara, atau alat angkut lain yang keluar, masuk, atau berada di wilayah pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas. Kategori Merah menunjukkan bahwa alat angkut memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Misalnya: berasal dari wilayah yang sedang mengalami wabah atau kejadian luar biasa penyakit menular; terdapat penumpang atau awak yang diduga atau terkonfirmasi menderita penyakit menular; ditemukan faktor risiko kesehatan lain yang memerlukan tindakan kekarantinaan. Kurang dari 2 × 24 Jam merupakan standar waktu penyelesaian pelayanan, yaitu dokumen diterbitkan dalam waktu kurang dari 48 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan proses pemeriksaan selesai.

3. Definisi Operasional

Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) sesuai hasil risk based assesment dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam, sejak alat angkut masuk di wilayah perairan pintu masuk setempat selama kurun waktu 1 tahun.

4. Rumus/Cara Perhitungan

Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam dapat diukur dengan rumus dan cara perhitungan berikut :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen kedatangan yang diterbitkan} \leq 2 \times 24 \text{ jam}}{\text{Total dokumen dari kategori merah}} \times 100\%$$

5. Capaian Indikator

a. Capaian Kinerja

Pada Semester I Tahun 2026 Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut Kategori Merah < 2 x 24 Jam pada tahun evaluasi berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%, atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,26%.



Respon ini mencakup pemeriksaan kesehatan ketat di zona karantina hingga penerbitan dokumen kekarantinaan seperti Certificate of Pratique (COP) atau izin kekarantinaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan upaya cegah-tangkal masuk dan keluarnya penyakit menular serta Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Wilayah Kerja BKK Kelas II Pangkalpinang.

Penyebab seluruh alat angkut (100%) dikategorikan ke dalam RBA Merah adalah riwayat perjalanan (port of call) dari wilayah/negara luar negeri terjangkit atau singgah dari negara terjangkit, yaitu Thailand, Bangladesh, Liberia dan Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan status RBA Merah pada periode ini murni bersifat epidemiologis (risiko asal wilayah), bukan karena adanya temuan indikasi penyakit aktual di atas kapal. Seluruh pemeriksaan terhadap 10 alat angkut RBA Merah (100%) berhasil diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 2x24 jam sejak alat angkut tiba/bersandar di zona labuh. Capaian ini menunjukkan efisiensi dan kesiapsiagaan tinggi dari tim teknis di lapangan, sehingga mampu mencegah keterlambatan operasional pelabuhan (demurrage).

b. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Berikut adalah tabel perbandingan data kinerja indikator pelayanan alat angkut kategori merah (alat angkut yang teridentifikasi memiliki faktor risiko penyakit tinggi atau membawa penyakit menular):

Tabel 3. 15 perbandingan data kinerja indikator pelayanan alat angkut kategori merah (alat angkut yang teridentifikasi memiliki faktor risiko penyakit tinggi atau membawa penyakit menular)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Status
Persentase Penerbitan Dokumen Layanan	95%	100%	105,26%	Sangat Baik
Kekarantinaan				
Kesehatan untuk Alat				



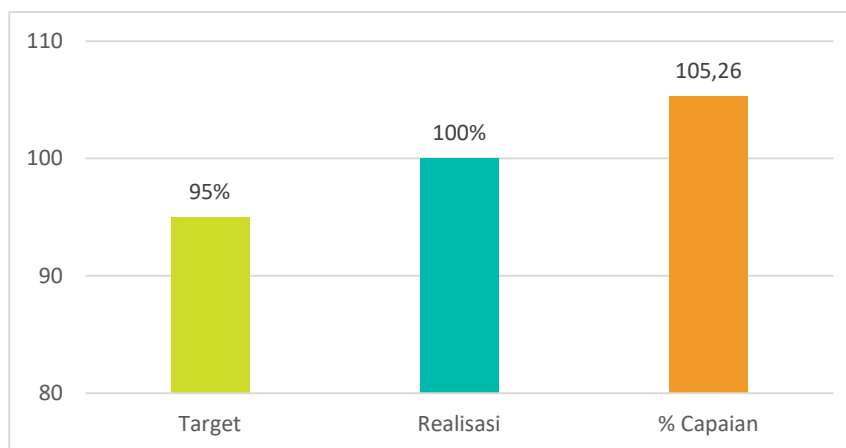
Angkut dalam Kategori
Merah Kurang Dari 2 x
24 Jam

Tabel di atas menunjukkan persentase capaian kinerja penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2 x 24 jam Semester 1 Tahun 2026 sebesar 105,26%. Selanjutnya dilakukan perhitungan capaian kinerja untuk indikator sebagai berikut:

$$\frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105,26\%$$

Dari perhitungan di atas, persentase realisasi penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2 x 24 jam per Semester 1 Tahun 2026 sebesar 100% dimana nilai capaian kinerja yang tercapai sebesar 105,26% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Semester 1 Tahun 2026 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3. 19 Target dan Realisasi Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2 x 24 Jam





Hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2 x 24 jam dapat tercapai sebesar 100% dengan persentase capaian kinerja 105,26%. Hal ini tentu tidak lepas dari kerja sama dan sinergi seluruh pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang yang telah melakukan penanganan dan pengawasan lebih intensif sesuai prosedur kekarantinaan kesehatan, seperti pemeriksaan lanjutan, investigasi faktor risiko, serta koordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan potensi kedaruratan kesehatan masyarakat.

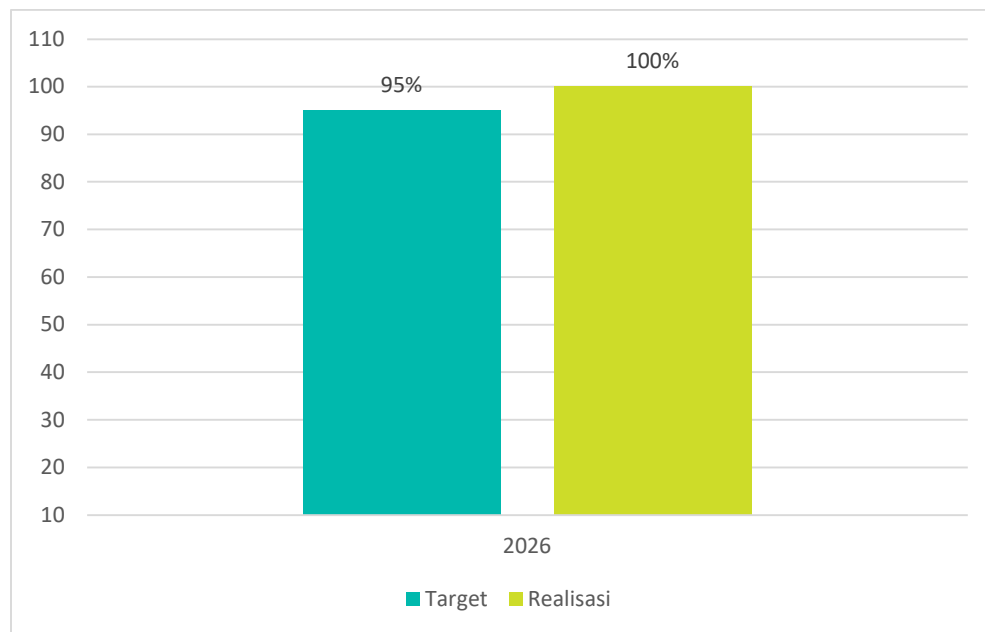
c. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2 x 24 jam apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator ini pada Semester I Tahun 2026 berbeda dengan Tahun 2025 karena adanya perubahan Rencana Strategis (Renstra), perubahan Rencana Aksi Program (RAP) dan perubahan Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Sehingga kinerja Semester I Tahun 2026 tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2025.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2 x 24 jam apabila dibandingkan dengan target RAK 2025-2029 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3. 20 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

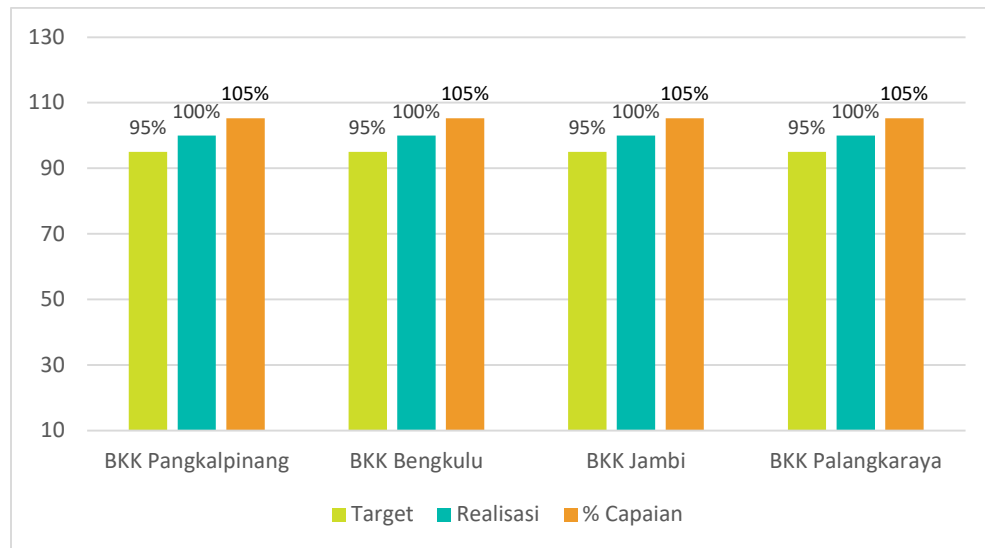


Indikator penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2 x 24 jam jika dibandingkan dengan target RAK masih teralisasi di atas target RAK Tahun 2026.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Satker Lainnya

Perbandingan realisasi penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2 x 24 jam satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dengan satker lainnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 3. 21 Perbandingan realisasi kinerja penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2 x 24 jam dengan satker lain



Pada Semester I Tahun 2026, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang beserta 3 satker pembanding yaitu BKK Bengkulu, BKK Jambi, dan BKK Palangkaraya telah mencapai target kinerja penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2 x 24 jam. Target yang ditetapkan untuk seluruh satker adalah sebesar 95%. Realisasi yang dicapai oleh keempat satker adalah 100%. Dengan demikian persentase capaian kinerja untuk seluruh satker adalah 105%, atau melebihi target sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa layanan penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut kategori prioritas merah telah dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan berjalan optimal di seluruh wilayah kerja.

6. Upaya yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Penempatan Alat Angkut; Kapal/alat angkut yang dikategorikan RBA Merah diwajibkan melakukan anchorage (berlabuh) di Zona Karantina/Zona Labuh;
- Pencegahan kontak langsung Selama berada di zona karantina, alat angkut tidak diperbolehkan melakukan aktivitas bongkar muat, bersandar di dermaga utama, atau melakukan kontak langsung (menurunkan kru/penumpang) sebelum dilakukan pemeriksaan resmi oleh petugas BKK ;
- Pemeriksaan kesehatan ketat oleh Tim Teknis BKK



7. Analisa Penyebab Keberhasilan

- a. Digitalisasi layanan dengan penerapan integrasi pelaporan karantina secara elektronik melalui aplikasi SINKARKES (Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan) memungkinkan agen alat angkut mengunggah dokumen *pre-arrival notification* paling lambat 1 x 24 jam sebelum kedatangan;
- b. Standarisasi Prosedur (SOP) dengan penetapan respons cepat tim sanitarian dan dokter karantina dalam melakukan inspeksi langsung di zona karantina/sauh segera setelah alat angkut kategori merah tiba.
- c. Keterpaduan Lintas Sektor dengan koordinasi intensif bersama otoritas pelabuhan/bandara, imigrasi, dan bea cukai dalam mengisolasi alat angkut kategori merah sehingga tindakan kekarantinaan (seperti fumigasi atau disinfeksi) dapat langsung dieksekusi tanpa penundaan

8. Kendala yang Dihadapi

- a. **Gangguan sistem informasi:** Ketergantungan pada sistem digital seperti SINKARKES atau Indonesia Single Window (INSW) terkadang menghadapi kendala server down, pemeliharaan sistem (maintenance), atau blank spot sinyal di area pelabuhan lepas pantai (zona sauh). Hal ini memaksa petugas beralih ke input manual yang memakan waktu lebih lama;
- b. **Cuaca Buruk dan Gelombang Tinggi:** Kondisi alam seperti cuaca ekstrem, angin kencang, dan gelombang tinggi sering kali menunda keberangkatan petugas ke zona sauh demi keselamatan jiwa. Hal ini secara otomatis memotong durasi batas waktu 2 x 24 jam yang tersedia. Ketersediaan media KIE untuk mendukung WBK belum maksimal;
- c. **Keterlambatan Pelaporan Agen Alat Angkut:** Masih adanya agen pelayaran atau maskapai yang terlambat mengunggah dokumen pre-arrival notification (pemberitahuan kedatangan), atau memberikan data manifest kesehatan yang tidak akurat, sehingga petugas kehilangan waktu untuk melakukan analisis risiko dini sebelum alat angkut tiba.

9. Pemecahan masalah yang bisa dilakukan



- a. **Monitoring Penerapan SOP kontinjensi:** Menggunakan formulir manual (IKR offline) yang langsung didelegasikan ke posko pelabuhan, lalu diinput ke sistem tinggi.
- b. **Sistem komunikasi darurat:** Melakukan koordinasi via radio pemancar (VHF Channel) untuk panduan karantina mandiri sementara di atas kapal hingga cuaca aman bagi petugas. Mendesain dan menambah media KIE agar lebih bervariasi;
- c. **Sanksi administratif & edukasi:** Memberikan teguran tertulis atau penundaan izin bersandar (clearance) bagi agen yang melanggar aturan batas waktu lapor 1x24 jam.

10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Efisiensi berada pada range -20 sd 20. Minus 20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya efisien

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E = Efisiensi

PAKi = Alokasi per Indikator

CKi = Persen Capaian Indikator

RAKi = Realisasi Anggaran per Indikator

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{((17.793.000 \times 1,05) - 240.000)}{17.793.000 \times 1,05} \times 100 \% = 0,99$$



Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Untuk indikator kinerja penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2 x 24 jam dapat tercapai sebesar 100% atau 105,26% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.240.000,- atau 1,35% dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.793.000,-. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, efisiensi berada pada 0,99 yang berarti indikator nilai kinerja implementasi WBK satker berjalan efisien dengan anggaran 1,35% dapat mencapai kinerja 105,26%.

RO yang mendukung indikator ini tidak termasuk ke dalam RO yang menjadi perhitungan efisiensi SBK. Sehingga nilai efisiensi SBK indikator ini tidak dapat diperhitungkan.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, dipengaruhi oleh unsur-unsur di bawah ini:

1. Man : Sumber daya manusia yaitu seluruh pegawai BKK Kelas II Pangkalpinang yang bertugas di kantor induk/wilayah kerja yang terdiri dari dokter, perawat, epidemiolog, sanitarian, entomolog dan pranata laboratorium kesehatan.
2. Machine : Sarana dan Prasarana yang mendukung seperti laptop, jaringan internet, media komunikasi, media KIE dan kamera.
3. Money : Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini sebesar Rp 17.793.000.
4. Method : prosedur operasional untuk pencapaian indikator ini merujuk pada Prosedur operasional untuk pencapaian indikator ini merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang.
5. Material : Dokumen kekarantinaan alat angkut seperti COP (*Certificate of Pratique*) dan SSCEC (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate*).
6. Time : Waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian indikator ini adalah Januari – Desember Tahun 2026.



Indikator Ketujuh : Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance

1. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

2. Pengertian

Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK (Balai/Instansi Kekarantinaan Kesehatan) dalam prinsip Zero Tolerance adalah setiap bentuk tindakan yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

3. Definisi Operasional

Tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan/atau



bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut yang berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang.

4. Rumus/Cara Perhitungan

Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance dapat diukur berdasarkan jumlah kasus penyalahgunaan kewenangan yang terbukti berdasarkan LHP / LHA Itjen.

5. Capaian Indikator

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Pada Semester I Tahun 2026 tidak ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala BKK. Penyalahgunaan kewenangan yang dimaksud meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Kondisi ini mencerminkan komitmen Kepala BKK dalam menjalankan prinsip Zero Tolerance dan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sampai dengan akhir tahun 2026, BKK Pangkalpinang optimis tidak akan ditemukan kasus penyalahgunaan kewenangan. Hal ini didukung dengan penguatan sistem pengendalian internal, implementasi SOP yang konsisten, serta budaya kerja integritas yang terus dijaga oleh seluruh jajaran.

b. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2025 tidak ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala BKK. Kondisi yang sama juga terjadi pada Semester I Tahun 2026 tidak ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala BKK. Penyalahgunaan kewenangan yang dimaksud meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan/atau bertindak



sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dengan demikian, capaian indikator Zero Tolerance terhadap penyalahgunaan wewenang dapat dipertahankan selama 2 periode berturut-turut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Realisasi indikator ini sebesar 0 kasus penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala BKK pada Semester I Tahun 2026 telah sesuai sepenuhnya dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan, yaitu sebesar 0 penyalahgunaan. Penyalahgunaan kewenangan yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Cakupan ini juga termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Capaian "nihil kasus" selama 2 periode berturut-turut ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip Zero Tolerance di lingkungan BKK telah berjalan efektif. Seluruh kebijakan dan keputusan strategis yang diambil oleh Kepala BKK telah berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara, organisasi, maupun kepentingan publik.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Satker Lainnya

Perbandingan realisasi kinerja penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala BKK satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang dengan satker lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala BKK dengan Satker Lain

No	Satker	Target	Realisasi
1	BKK Pangkalpinang	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan
2	BKK Bengkulu	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan
3	BKK Jambi	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan
4	BKK Palangkaraya	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan



Realisasi kinerja penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala BKK pada BKK Pangkalpinang mencapai 0 penyalahgunaan, sama dengan target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan satker lain yaitu BKK Bengkulu, BKK Jambi, dan BKK Palangkaraya, seluruhnya juga mencapai target 0 penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan pengawasan terhadap kewenangan pimpinan di lingkungan BKK telah berjalan efektif.

6. Upaya yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- a. Peran Seluruh pejabat di lingkungan BKK menandatangani Pakta Integritas setiap awal tahun sebagai komitmen bersama untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan;
- b. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM;
- c. Menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan kewenangan pada proses bisnis utama, khususnya di bidang kepegawaian dan keuangan;
- d. Optimalisasi Whistle Blowing System / WBS dengan menyediakan saluran pengaduan yang aman dan rahasia bagi pegawai dan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang;
- e. Transparansi dalam Pengambilan kebijakan terkait anggaran, kepegawaian, dan aset diumumkan dan dapat diakses sehingga meminimalisir potensi konflik kepentingan.

7. Analisa Penyebab Keberhasilan

- a. Pimpinan menjadi contoh dalam menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi;
- b. Sistem pengawasan berjalan efektif melalui SPIP dan Whistle Blowing System sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal;
- c. Budaya integritas terbangun melalui sosialisasi aturan dan Pakta Integritas sehingga seluruh pegawai memahami batasan wewenang dan menolak KKN;



- d. Tata kelola dilaksanakan secara transparan dan akuntabel terutama pada bidang anggaran dan kepegawaian sehingga wewenang digunakan sesuai dengan tujuannya.

8. Kendala yang Dihadapi

- a. Pemahaman pegawai terhadap peraturan dan batasan wewenang belum merata.

9. Pemecahan Masalah yang Bisa Dilakukan

- a. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kode etik secara berkala kepada seluruh pegawai.

10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Efisiensi berada pada range -20 sd 20. Minus 20 artinya tidak efisien sedangkan +20 artinya efisien

Keterangan :

E = Efisiensi

PAKi = Alokasi per Indikator

CKi = Persen Capaian Indikator

RAKi = Realisasi Anggaran per Indikator

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{((Rp\ 11.798.000 \times 1) - 0)}{Rp\ 11.798.000 \times 1} \times 100\% = 0$$



Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Indikator kinerja penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi sebesar 0%. Ini berarti indikator nilai kinerja anggaran berjalan efisien dengan anggaran 0% dapat mencapai kinerja sesuai target.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, dipengaruhi oleh unsur-unsur di bawah ini:

1. Man : Seluruh ASN dan Non ASN BKK Kelas II Pangkalpinang.
2. Money : Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini sebesar Rp 11.798.000.
3. Machine : Sarana dan Prasarana yang mendukung seperti laptop, jaringan internet, dan media komunikasi.
4. Method : Prosedur operasional untuk pencapaian indikator ini merujuk pada LHP Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
5. Material : Dokumen yang mendukung dalam kegiatan indikator ini berupa dokumen pakta integritas dan SOP, serta sistem pelaporan pengaduan masyarakat yang berjalan efektif .
6. Time : Waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian indikator ini adalah Januari – Desember Tahun 2026.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator program maupun indikator kinerja kegiatan diperlukan dukungan sumber daya yang memadai yang terdiri atas Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Petikan DIPA nomor SP DIPA- 024.05.2.415944/2026 tanggal 01 Desember 2025 sebesar Rp. 14.616.349.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 13.455.406.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 1.160.943.000,-.



Selanjutnya melalui Surat Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit nomor PR.04.02/C/5644/2025 tanggal 15 Desember 2025 hal Penetapan Distribusi Pagu Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden TA. 2026, satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang mendapatkan distribusi sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Rekapitulasi keseluruhan distribusi pagu penguatan dukungan pelaksanaan prioritas direktif presiden

Total Keseluruhan Pagu Awal	Total Keseluruhan Blokir (A)	Total Keseluruhan Blokir (Pergeseran/ dialihkan/Hapus pada RKA Satker)	Total Keseluruhan Blokir (A + Pergeseran/ dialihkan/Hapus pada RKA Satker)	Total Keseluruhan Pagu Efektif	Total Keseluruhan Pagu Menjadi (Termasuk Blokir A)
14.616.349.000	435.369.000	497.493.000	932.862.000	13.683.487.000	14.118.856.000

Berdasarkan tabel diatas bahwa satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang mendapatkan blokir (A) sebesar Rp. 435.369.000,- dan pergeseran ke RO khusus (Hapus pada RKA Satker) sebesar Rp. 497.493.000,- sehingga total pagu efektif menjadi sebesar Rp. 13.683.487.000,- dan total pagu keseluruhan menjadi sebesar Rp. 14.118.856.000,- serta telah ditetapkan dalam Petikan DIPA revisi ke 01 pada tanggal 24 Desember 2025.

Kemudian melalui surat Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit nomor PR.04.02/C/1311/2026 tanggal 9 Maret 2026 hal Penetapan Distribusi Pagu Revisi Kewenangan DJA Tahap 3 di Lingkungan Ditjen Penanggulangan Penyakit Tahun Anggaran 2026, satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang mendapatkan distribusi pagu buka blokir sebesar Rp. 152.062.000,- sehingga pagu anggaran menjadi yang tertera pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 18 Distribusi Buka Blokir Pagu Anggaran Bulan April TA 2026**

Semula		Menjadi		Nilai Perubahan	
Pagu	Blokir	Pagu	Blokir	Pagu	Blokir
14.118.856.000	435.369.000	14.118.856.000	283.307.000	-	(152.062.000)

Berdasarkan tabel diatas, bahwa satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang mendapatkan buka blokir sebesar Rp. 283.307.000,- sehingga nilai anggaran total efektif bertambah menjadi sebesar Rp. 13.835.549.000,- dari total pagu anggaran Rp. 14.118.856.000,- serta telah ditetapkan dalam Petikan Dipa revisi ke 03 pada tanggal 7 April 2026.

Pada Triwulan II, melalui surat dari Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit nomor PR.04.02/C/2907/2026 tanggal 22 Mei 2026 hal Penetapan Distribusi Pagu Revisi Kewenangan DJA di Lingkungan Ditjen Penanggulangan Penyakit Tahun Anggaran 2026, satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang mendapatkan distribusi pagu buka blokir sebesar Rp. 283.307.000,- atau senilai jumlah total blokir sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp. 14.118.856.000,- serta telah ditetapkan dalam Petikan Dipa revisi ke 07 pada tanggal 29 Juni 2026.

Selain itu alokasi anggaran masing-masing per jenis belanja pada Tahun 2026 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 19 Alokasi Anggaran Blokir per Jenis Belanja Tahun 2026

No	Jenis Belanja	Pagu Keseluruhan (Rp)	Blokir (Rp)	Efektif (Rp)
1	Belanja Pegawai	10.461.604.000	0	10.461.604.000
2	Belanja Barang	3.477.252.000	0	3.477.252.000
3	Belanja Modal	0	0	0
Total		14.118.856.000	0	14.118.856.000

Berdasarkan tabel di atas, Pada Tahun Anggaran 2026 tidak terdapat alokasi anggaran yang diblokir pada seluruh jenis belanja. Dengan demikian, seluruh pagu



sebesar Rp14.118.856.000,- berstatus Efektif dan dapat digunakan 100% untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Anggaran belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp. 10.461.604.000. Anggaran belanja barang ditetapkan sebesar sebesar Rp. 3.477.252.000. Sedangkan tidak ada alokasi anggaran belanja modal di Tahun 2026.

Tabel 3. 20 Alokasi Anggaran Blokir per Jenis Sumber Dana Tahun 2026

No	Jenis Belanja	Pagu Keseluruhan (Rp)	Blokir (Rp)	Efektif (Rp)
1	RM	12.957.913.000	0	12.957.913.000
2	PNBP	1.160.943.000	0	1.160.943.000
Total		14.118.856.000	0	14.118.856.000

Berdasarkan tabel diatas, satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Per Juni Tahun Anggaran 2026 pada sumber dana Rupiah Murni (RM) mempunyai total pagu anggaran sebesar Rp. 12.957.913.000,- tidak ada blokir anggaran sumber dana Rupiah Murni (RM) sehingga anggaran efektif yang bisa digunakan tetap sebesar Rp. 12.957.913.000,- sedangkan sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mempunyai total pagu anggaran sebesar Rp. 1.160.943.000,- tidak terdapat blokir anggaran sehingga anggaran efektif yang bisa digunakan tetap sebesar Rp. 1.160.943.000,-.

Tabel 3. 21 Alokasi Anggaran Blokir per Per Program/Kegiatan Tahun 2026

No	Jenis Belanja	Pagu Keseluruhan	Blokir	Efektif
1	7960	1.017.406.000	0	1.017.406.000
2	4815	13.101.450.000	0	13.101.450.000
Total		14.118.856.000	0	14.118.856.000

Berdasarkan tabel di atas, satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Per bulan Juni Tahun Anggaran 2026 pada kegiatan (7960) Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan mempunyai total pagu anggaran sebesar Rp. 1.017.406.000,- tidak terdapat blokir anggaran sehingga anggaran efektif yang bisa digunakan tetap sebesar Rp. 1.017.406.000,- sedangkan



kegiatan (4815) Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit mempunyai total pagu anggaran sebesar Rp. 13.101.450.000,- tidak terdapat blokir anggaran sehingga anggaran efektif yang bisa digunakan tetap sebesar Rp. 13.101.450.000,-.

Tabel 3. 22 Alokasi Anggaran Blokir per Jenis RO Tahun 2025

Kode	Rincian	Vol	Satuan	Pagu Anggaran	Blokir (A)	Efektif
Keseluruhan				14.118.856.000	0	14.118.856.000
024.05.DZ	Program Sistem Ketahanan Kesehatan			1.017.406.000	0	1.017.406.000
7960	Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan					
7960.PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS-29)	1	kegiatan	13.468.000	0	13.468.000
7960.PEF.001	Sosialisasi pelaksanaan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah (HS-29)	110	orang	15.838.000	0	15.838.000
7960.QAA.001	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (HS-29)	30	Orang	13.540.000	0	13.540.000
7960.QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan (HS-29)	11	layanan	141.656.000	0	141.656.000
7960.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut (HS-29)	5	layanan	94.210.000	0	94.210.000
7960.QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	15	layanan	18.390.000	0	18.390.000
7960.QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes dan leptospirosis	27	layanan	79.137.000	0	79.137.000
7960.QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	14	layanan	6.748.000	0	6.748.000
7960.QAH.U10	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	4	layanan	5.448.000	0	5.448.000
7960.QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	96	layanan	34.560.000	0	34.560.000
7960.QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	28	layanan	48.160.000	0	48.160.000
7960.QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	48	layanan	25.440.000	0	25.440.000
7960.QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	7	layanan	9.198.000	0	9.198.000
7960.QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	7	layanan	38.185.000	0	38.185.000



Kode	Rincian	Vol	Satuan	Pagu Anggaran	Blokir (A)	Efektif
7960.QAH.U25	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi dalam kota	4	layanan	75.800.000	0	75.800.000
7960.QAH.U28	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi dalam kota	4	layanan	69.200.000	0	69.200.000
7960.QAH.U32	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	100	layanan	145.000.000	0	145.000.000
7960.QAH.U38	Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	6	layanan	4.080.000	0	4.080.000
7960.RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (HS-29)	5	Paket	179.348.000	0	179.348.000
024.05.WA	Program Dukungan Manajemen			13.101.450.000	0	13.101.450.000
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit					
4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2	Layanan	17.793.000	0	17.793.000
4815.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	11.798.000	0	11.798.000
4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	12.957.913.000	0	12.957.913.000
4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	11	Orang	96.386.000	0	96.386.000
4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	17.560.000	0	17.560.000

Berdasarkan tabel diatas, satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Per bulan Juni Tahun Anggaran 2026 mempunyai total pagu anggaran sebesar Rp. 14.118.856.000,- tidak terdapat blokir anggaran sehingga anggaran efektif yang bisa digunakan tetap sebesar Rp. 13.835.549.000,-. Pada RO diatas terdapat RO dengan pagu anggaran tertinggi yaitu RO Layanan Perkantoran sebesar Rp. 12.957.913.000,- dan tidak terdapat blokir anggaran sedangkan RO dengan pagu anggaran terendah yaitu RO Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi sebesar Rp. 4.080.000,- tidak terdapat blokir sehingga efektif yang bisa digunakan tetap sebesar Rp. 4.080.000,-.



Realisasi anggaran masing-masing per jenis belanja pada Semester I Tahun 2026 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu Keseluruhan	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	10.641.604.000	5.489.123.185	51,58%
2	Belanja Barang	3.477.252.000	1.325.959.028	38,13%
3	Belanja Modal	0		
Total		14.118.856.000	6.815.082.213	48,27%

Berdasarkan tabel diatas, satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026 realisasi anggaran per jenis belanja sampai dengan akhir Juni tahun 2026 sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran per jenis belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 5.489.123.185,- atau persentase tercapai sebesar 51,58% dari pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 10.641.604.000,-;
2. Realisasi anggaran per jenis belanja barang terealisasi sebesar Rp. 1.325.959.028,- atau persentase tercapai sebesar 38,13% dari pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 3.477.252.000,-.

Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran per Sumber Dana

No	Jenis Belanja	Pagu Keseluruhan	Realisasi	% Realisasi
1	RM	12.957.913.000	6.388.819.516	49,30%
2	PNBP	1.160.943.000	426.262.697	36,72%
Total		14.118.856.000	6.815.082.213	48,27%

Berdasarkan tabel diatas, satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026 realisasi anggaran per sumber dana sampai dengan akhir Juni tahun 2026 sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran per sumber dana Rupiah Murni (RM) terealisasi sebesar Rp. 6.388.819.516,- atau persentase tercapai sebesar 49,30% dari pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 12.957.913.000,-;



- Realisasi anggaran per sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp. 426.262.697,- atau persentase tercapai sebesar 36,72% dari pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 1.160.943.000,-.

Tabel 3. 25 Realisasi Anggaran per Jenis Program/Kegiatan

No	Jenis Belanja	Pagu Keseluruhan	Realisasi	% Realisasi
1	7960	1.017.406.000	414.847.997	40,78%
2	4815	13.101.450.000	6.400.234.216	48,85%
Total		14.118.856.000	6.815.082.213	48,27%

Berdasarkan tabel diatas, satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026 realisasi anggaran per kegiatan sampai dengan akhir Juni tahun 2026 sebagai berikut:

- Realisasi anggaran per kegiatan (7960) Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan terealisasi sebesar Rp. 414.847.997,- atau persentase tercapai sebesar 40,78% dari pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 1.017.406.000,-;
- Realisasi anggaran per kegiatan (4815) Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit terealisasi sebesar Rp. 6.400.234.216,- atau persentase tercapai sebesar 48,85% dari pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 13.101.450.000,.

1. Realisasi Anggaran per Masing-Masing Indikator

Realisasi anggaran per masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 26 Realisasi Anggaran Per Indikator

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2026	Target Kinerja Semester I Tahun 2026	Capaian Semester I Tahun 2026	% Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76%	76%	100%	131,58	1.017.406.000	414.847.997	40,78%



	Berpotensi KLB/Wabah								
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	Nilai SAKIP	83	83	83,70	100,84	96.386.000	7.500.000	7,78%
		Nilai Kinerja Anggaran	92,75	46,40	66,82	144,01	17.560.000	3.674.700	20,93%
		Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	0%	0%	0,00%	100,00	0	0	0,00%
		Persentase Realisasi Anggaran	96%	48%	48,27%	100,56	12.957.913.000	6.388.819.516	49,30%
		Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori merah kurang dari 2 x 24 Jam	95%	95%	100,0%	105,26	17.793.000	240.000	1,35%
		Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	95	95	100%	105,26	11.798.000	0	0,00%
Total Capaian					787,52		14.118.856.000	6.815.082.213	48,27%
Rata - Rata Capaian					112,50				

Tabel di atas menunjukkan indikator kinerja kegiatan Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah memiliki realisasi anggaran (Rp. 414.847.997) dengan persentase capaian paling tinggi (40,78%). Pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya., indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran memiliki realisasi anggaran paling besar (Rp. 6.388.819.516) dengan persentase capaian (49,30%).

2. Realisasi Anggaran per Rincian Output

Untuk perbandingan realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Capaian KRO dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi dan Anggaran per Rincian Output**

KODE	URAIAN	Output		Capaian (%)	Anggaran (Rp)		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Pagu Anggaran	Realisasi	
Jumlah Seluruhnya		538	241	44,80	14.118.856.000	6.815.082.213	48,27
024.05.DZ	Program Sistem Ketahanan Kesehatan	522	237	45,40	1.017.406.000	414.847.997	40,78
7960	Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	522	237	45,40	1.017.406.000	414.847.997	40,78
7960.PEA	Koordinasi[Base Line]	1	0	0,00	13.468.000	-	0,00
7960.PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	1	0	0,00	13.468.000	-	0,00
7960.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi[Base Line]	110	50	45,45	15.838.000	3.000.000	18,94
7960.PEF.001	Sosialisasi pelaksanaan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah (HS-29)	110	50	45,45	15.838.000	3.000.000	18,94
7960.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat [Orang, Akta, Keping, Bidang] [00]	30	4	13,33	13.540.000	1.797.207	13,27
7960.QAA.001	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)	30	4	13,33	13.540.000	1.797.207	13,27
7960.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	376	180	47,87	795.212.000	271.883.320	34,19
7960.QAH.016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	11	4	36,36	141.656.000	38.173.100	26,95
7960.QAH.017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	5	2	40,00	94.210.000	10.024.220	10,64
7960.QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	15	7	46,67	18.390.000	6.028.000	32,78
7960.QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes dan leptospirosis (HS)	27	13	48,15	79.137.000	16.320.000	20,62
7960.QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	14	7	50,00	6.748.000	-	0,00
7960.QAH.U10	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria (HS)	4	0	0,00	5.448.000	-	0,00
7960.QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	96	48	50,00	34.560.000	13.600.000	39,35
7960.QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	28	14	50,00	48.160.000	15.640.000	32,48
7960.QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	48	20	41,67	25.440.000	11.050.000	43,44
7960.QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	7	2	28,57	9.198.000	340.000	3,70
7960.QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	7	2	28,57	38.185.000	6.388.000	16,73
7960.QAH.U25	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi dalam kota	4	4	100,00	75.800.000	75.800.000	100,00
7960.QAH.U28	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi dalam kota	4	4	100,00	69.200.000	3.200.000	4,62
7960.QAH.U32	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi	100	52	52,00	145.000.000	74.960.000	51,70



KODE	URAIAN	Output		Capaian (%)	Anggaran (Rp)		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Pagu Anggaran	Realisasi	
	husus skala besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi						
7960.QAH.U38	Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	6	1	16,67	4.080.000	360.000	8,82
7960.RAB	Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]	5	3	60	179.348.000	138.167.470	77,04
7960.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk (HS)	5	3	60,00	179.348.000	138.167.470	77,04
024.05.WA	Program Dukungan Manajemen	16	4	25,00	13.101.450.000	6.400.234.216	48,85
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	16	4	25,00	13.101.450.000	6.400.234.216	48,85
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	4	0	0,00	12.987.504.000	6.389.059.516	49,19
4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2	0	0,00	17.793.000	240.000	1,35
4815.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	0	0,00	11.798.000	-	0,00
4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	0,00	12.957.913.000	6.388.819.516	49,30
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	11	4	36,36	96.386.000	7.500.000	7,78
4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	11	4	36,36	96.386.000	7.500.000	7,78
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	1	0	0,00	17.560.000	3.674.700	20,93
4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	0,00	17.560.000	3.674.700	20,93

Berdasarkan tabel di atas, anggaran terealisasi sebesar 99,80% dari pagu efektif dengan output kegiatan tercapai 100%. Dari 30 RO yang ada, 9 RO yang seluruh anggaran nya diblokir. Sedangkan realisasi anggaran paling tinggi pada RO ada 5 RO yaitu QAH.U02, QAH.U11, QAH.U12, QAH.U15, EBA.958 dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Jika dilihat secara total realisasi capaian output lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Perbedaan besaran target setiap RO berpengaruh terhadap rendahnya realisasi capaian output secara keseluruhan.



C. EFISIENSI SUMBER DAYA

Berdasarkan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran indikator dengan capaian indikator dan realisasi anggaran indikator dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran indikator dengan capaian indikator. Rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E = Efisiensi

PAKi = Alokasi per Indikator

CKi = Persen Capaian Indikator

RAKi = Realisasi Anggaran per Indikator

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa miniman efisiensi yang dicapai sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan adalah skala minimal 0%. Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh Nilai Efisiensi sebagai berikut:

**Tabel 3. 28 Nilai Efisiensi per Indikator Kinerja Tahun 2026**

No	Indikator	Pagu Anggaran (efektif) Keluaran (PAKi)	Realisasi Anggaran Keluaran (RAKi)	Capaian Keluaran (CKi)	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
1.	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	1.017.406.000	414.847.997	1,32	0,69	223%	Efisien
2.	Nilai SAKIP	96.386.000	7.500.000	1,01	0,92	281%	Efisien
3.	Nilai Kinerja Anggaran	17.560.000	3.674.700	1,44	0,85	264%	Efisien
4.	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	Efisien
5.	Persentase Realisasi Anggaran	12.957.913.000	6.388.819.516	1,01	0,51	177%	Efisien
6.	Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori merah kurang dari 2 x 24 Jam	17.793.000	240.000	1,05	0,99	297%	Efisien
7.	Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	11.798.000	0	1,05	1,00	300%	Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi atas 7 indikator kinerja pada Semester I Tahun 2026, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang berada pada kategori "Efisien" untuk seluruh indikator. Nilai efisiensi berkisar antara 177% sampai dengan 300%. Nilai efisiensi tertinggi terdapat pada indikator Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance sebesar 300%, dan terendah pada indikator Persentase Realisasi Anggaran sebesar 177%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian keluaran yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan anggaran yang dikeluarkan. Realisasi anggaran sampai dengan Semester I mencapai Rp 6.388.819.516 atau 49,31% dari pagu efektif Rp12.957.913.000. Dengan demikian pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan optimal, efektif, dan berorientasi pada hasil

**Tabel 3. 29 Nilai Efisiensi SBK Semester I Tahun 2026**

Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	1.226.000	6.028.000	15	7	861.142	364.858	30	0
Layanan survei faktor risiko penyakit pes dan leptospirosis	2.931.000	16.320.000	27	13	1.255.384	1.675.616	57	0
Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	360.000	13.600.000	96	48	283.333	76.667	21	0
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	1.720.000	15.640.000	28	14	1.117.142	602.858	35	0
Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	1.314.000	340.000	7	2	170.000	1.144.000	87	0
Layanan survei faktor risiko penyakit TB	5.455.000	6.388.000	7	2	3.194.000	2.261.000	41	0
Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi dalam kota	19.390.000	75.800.000	4	4	18.950.000	440.000	2	2
Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi dalam kota	17.700.000	3.200.000	4	4	800.000	16.900.000	95	0
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	1.450.000	74.960.000	100	52	1.441.538	8.462	1	0
Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	680.000	360.000	6	1	360.000	320.000	47	0
Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	1.226.000	6.028.000	15	7	861.142	364.858	30	0
Layanan survei faktor risiko penyakit pes dan leptospirosis	2.931.000	16.320.000	27	13	1.255.384	1.675.616	57	0
Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	360.000	13.600.000	96	48	283.333	76.667	21	0
Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	1.720.000	15.640.000	28	14	1.117.142	602.858	35	0
Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	1.314.000	340.000	7	2	170.000	1.144.000	87	0

Tabel di atas menunjukkan terdapat 1 dari 15 SBK yang memiliki nilai Efisiensi yaitu RO Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi dalam kota sedangkan 14 RO lainnya nilai efisiensi masih 0 . hal ini dikarenakan tidak ada selisih antara Indeks SBK dengan Indeks Realisasi Anggaran.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit selama Semester I Tahun 2026. Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja anggaran dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Untuk mendukung pencapaian kinerja, telah dilakukan penyesuaian program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, sehingga target kinerja kegiatan rata-rata tercapai sebesar 112,50% dengan capaian realisasi anggaran sebesar capaian realisasi anggaran 48,27% dari target akhir Tahun 2026 sebesar 96%.

Semua indikator kinerja Tahun 2026 pada Semester I Tahun telah tercapai dan melebihi target. Rincian capaian indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah tercapai sebesar 100% dari target 76% dengan persentase capaian kinerja sebesar 131,58%.
2. Nilai SAKIP tercapai sebesar 83,70 dari target 83 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,84%.
3. Nilai kinerja anggaran tercapai sebesar 66,82 dari target 46,40 dengan persentase capaian kinerja sebesar 144,01%.
4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti tercapai sebesar 100% dari target 95 dengan persentase capaian kinerja 105,26%.
5. Persentase realisasi anggaran tercapai sebesar 48,27% dari target 48% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,56%.
6. Penerbitan Dokumen Layanan KekarantinaanKesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori merah kurang dari 2 x 24 Jam tercapai sebesar 100% dari target 95% dengan persentase capaian kinerja sebesar 105,26%.
7. Penyalanggunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance tercapai sebesar 0 Penyalahgunaan dari target 0 penyalahgunaan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.



Pencapaian kinerja ini tentu tidak lepas dari komitmen semua SDM dalam pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan untuk peningkatan capaian kinerja, monitoring dan evaluasi secara berkala atas hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perbaikan untuk setiap tahapan pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan optimal.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan capaian program Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Ditjen Penanggulangan Penyakit (P2) dan mencapai target kinerja Tahun 2026 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang melalui upaya-upaya yang meliputi:

1. Pengajuan maksimum pencairan (MP) PNBK Tahap ke-2 di awal Juli Tahun 2026
2. Melakukan pengembangan inovasi “Klik BKK Pangkalpinang”.

Demikian Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang untuk menjadi kajian dan bahan telaahan serta bahan dalam upaya perencanaan, pengorganisasian, pengaturan dan pengawasan dalam menjalankan program-program di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang di tahun yang akan datang.